

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**OPTIMALISASI PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM ERA
PANDEMI COVID-19 GUNA KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :

**GANDAWILAGA, S.E., M.M.
KOLONEL LAUT (P) NRP 10682/P**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXII
LEMHANNAS RI
TAHUN 2021**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum W. W., Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII tahun 2021 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul: **“OPTIMALISASI PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM ERA PANDEMI COVID-19 GUNA KETAHANAN NASIONAL”**

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor: 22 tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXII dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap peserta PPRA LXII tahun 2021 Lemhannas RI.

Dalam kesempatan yang baik ini perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap kami, Bapak Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, S.I.P. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai

sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, DPR RI, Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan Mabes TNI serta siapa saja yang barangkali membutuhkannya dalam rangka membahas Optimalisasi Pembangunan Nasional Dalam Era Pandemi Covid-19 Guna Ketahanan Nasional.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu 'alaikum W. W.



Jakarta, Juli 2021

Penulis

Gandawisda
Gandawisda, S.E., M.M.
Kolonel Laut (P) NRP 10682/P



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

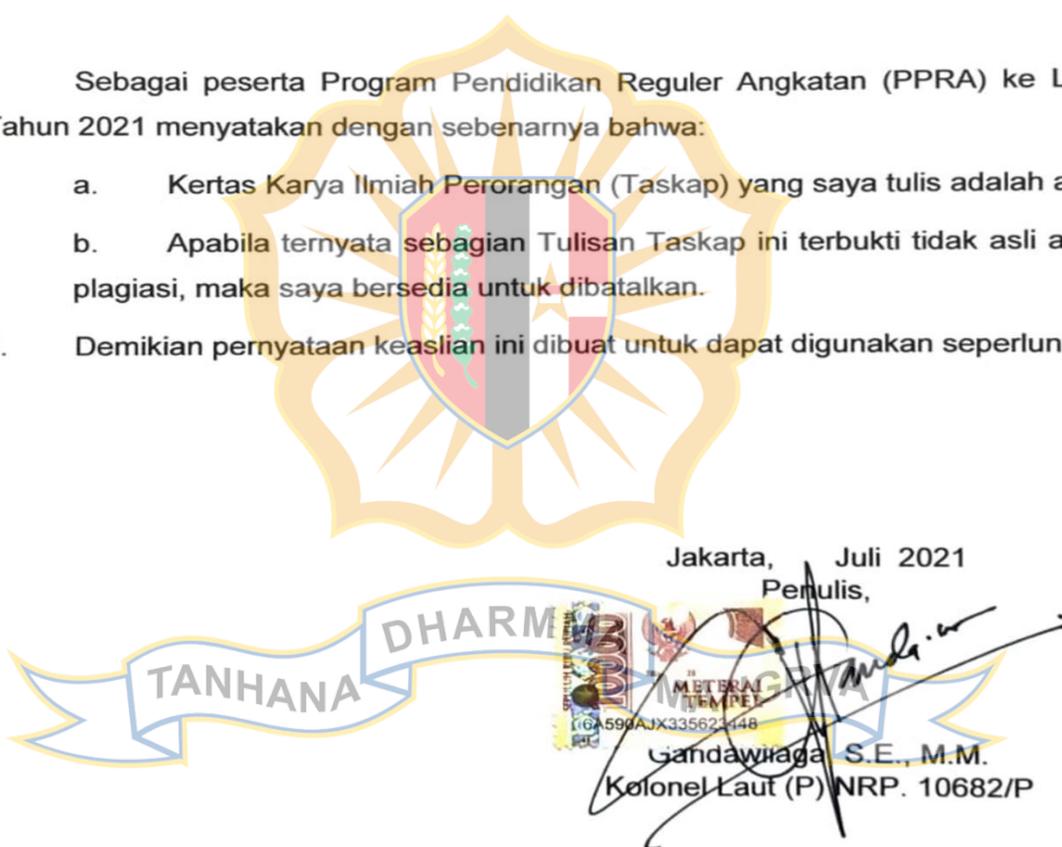
Nama : Gandawilaga, S.E., M.M.
Pangkat/NRP : Kolonel Laut (P) NRP.10682/P
Jabatan : Sekdis
Instansi : Disopslatal
Alamat : Komplek TNI AL Jl. Pulau Laki Blok E 17 nomor 12 RT 015
RW 03, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII Tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Juli 2021

Penulis,


Gandawilaga S.E., M.M.
Kolonel Laut (P) NRP. 10682/P

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

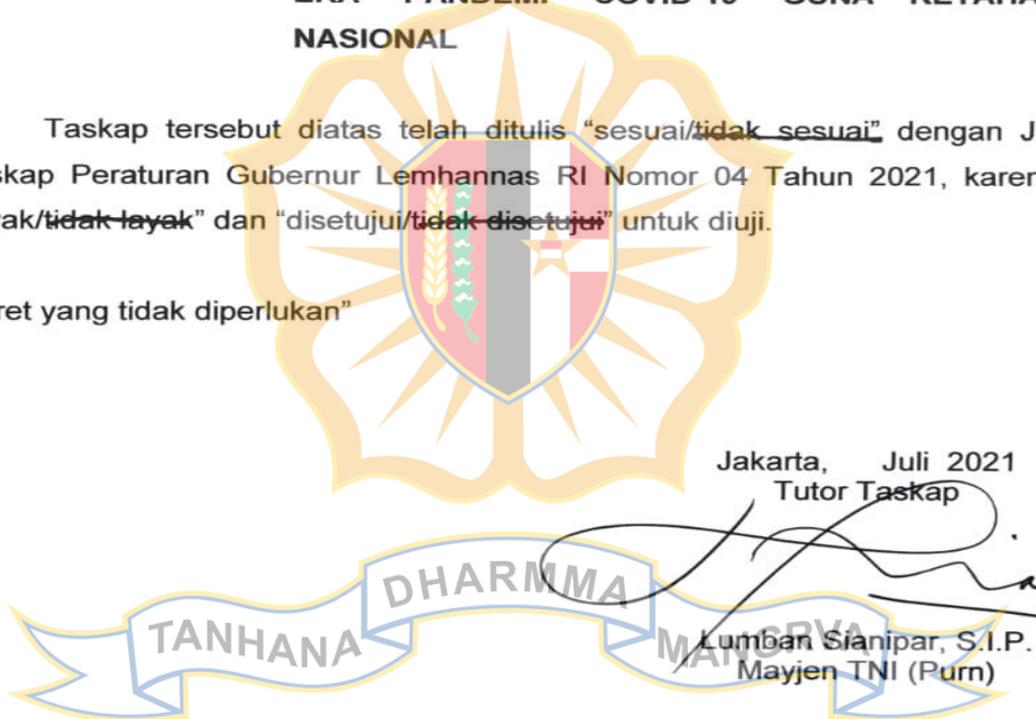
Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Gandawilaga, S.E., M.M.
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII
Lemhannas RI Tahun 2021
Judul Taskap : **OPTIMALISASI PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM
ERA PANDEMI COVID-19 GUNA KETAHANAN
NASIONAL**

Taskap tersebut diatas telah ditulis "~~sesuai~~/~~tidak sesuai~~" dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021, karena itu "~~layak~~/~~tidak layak~~" dan "~~disetujui~~/~~tidak disetujui~~" untuk diuji.

"coret yang tidak diperlukan"

Jakarta, Juli 2021
Tutor Taskap


Lumban Sianipar, S.I.P.
Mayjen TNI (Purn)

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
|  | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 3. Maksud dan Tujuan..... | 6 |
| 4. Ruang Lingkup dan Sistematika | 7 |
| 5. Metode dan Pendekatan | 8 |
| 6. Pengertian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 7. Umum | 10 |
| 8. Peraturan Perundang-Undangan | 10 |
| 9. Kerangka Teoritis | 14 |
| 10. Data dan Fakta | 16 |
| 11. Perkembangan Lingkungan Strategis Pengaruh Penyebaran Covid-19 Terhadap Pembangunan | 20 |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| 12. Umum | 28 |

| | | |
|-----|---|----|
| 13. | Optimalisasi Pembangunan Nasional Bidang Kesehatan Pada Era Pandemi Covid-19 | 32 |
| 14. | Optimalisasi Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan Pada Era Pandemi Covid-19 | 43 |
| 15. | Optimalisasi Pembangunan Nasional Bidang Ketahanan Pangan Pada Era Pandemi Covid-19 | 50 |

BAB IV PENUTUP

| | | |
|-----|-------------------|----|
| 16. | Simpulan | 56 |
| 17. | Rekomendasi | 57 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR.
2. DAFTAR TABEL.
3. RIWAYAT HIDUP.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit 34 Provinsi di Indonesia.

Tabel 3.2. Rasio Tenaga Kesehatan Indonesia di Setiap Daerah.

Tabel 3.3. Keuntungan Dan Kerugian Sistem Daring Dalam Pembelajaran.

Tabel 3.4. Resiko Bidang Pendidikan akibat Covid-19 Yang Berlangsung Lama.

Tabel 3.5. Tabel Negara Yang Terdampak Krisis Pangan Akibat Pandemi Covid 19.

Tabel 3.6. Jumlah Petani Indonesia Setiap Tahunnya.



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Corona virus muncul secara *un gradual*, pertama kali muncul di kota Wuhan negara China. Virus tersebut dinamai *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)* dengan penyakitnya yaitu *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)*. Covid-19 menyebar melalui pintu masuk pelabuhan, bandara udara maupun perbatasan darat antara negara. Tidak ada sebuah negara yang siap menghadapi wabah pandemi Covid-19 termasuk Indonesia. Kasus pertama di Indonesia baru terdeteksi pada Maret 2020, selanjutnya pada bulan berikutnya atau satu bulan dari pengumuman tadi, menunjukkan pasien positif telah mencapai lebih dari seribu orang¹. Perkembangan secara masif atas penyebaran Covid-19 selalu dipantau oleh pihak pemerintah dan diupdate setiap hari, untuk memantau penyebarannya dan memberikan sinyal dalam upaya pencegahannya. Pada awal Februari 2021, setidaknya terdapat 10.827 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Peningkatan tersebut menunjuk angka capaian hingga 1.157.837 orang, dengan kematian berjumlah 31.556 orang. Angka tersebut terhitung sejak diumumkannya kasus perdana, dengan data pasien *suspect* Covid-19 berjumlah 76.029 orang².

Penyebaran Covid-19 yang cepat tersebut telah membawa dampak pada pembangunan nasional Indonesia periode 2020-2024³. Berbagai upaya Pemerintah telah dilaksanakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Seluruh bidang pada rencana pembangunan nasional mengalami dampak dari penyebaran virus Covid-19 diantaranya bidang kesehatan, pendidikan dan ketahanan pangan yang akan menopang ketahanan nasional.

¹ <https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-klh.html?page=7> diunduh pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 07:41 WIB.

² <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/07/16153181/update-tambah-10827-kasus-covid-19-indonesia-kini-1157837-orang?page=all> diunduh pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 08:02 WIB

³ <https://ekbis.sindonews.com/read/12711/33/imbac-corona-rencana-pembangunan-nasional-2020-2024-terganggu-1588230246> diunduh pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 08:02 WIB

Berdasarkan pendapat para pakar kesehatan dokter spesialis penyakit dalam, menyatakan bahwa dampak yang dialami akibat penyebaran Covid-19, antara lain: rumah sakit yang kewalahan menampung pasien Covid-19, hal ini memunculkan keluhan masyarakat karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal, tenaga kesehatan dengan resiko tinggi terinfeksi Covid-19 apabila tidak mengenakan sarana APD (Alat Pelindung Diri) sesuai ketentuan protokol kesehatan, serta stigma masyarakat terhadap tenaga kesehatan yang dianggap penyebar virus Covid-19 karena merawat pasien yang terinfeksi Covid-19⁴. Kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan juga memberikan peran terhadap keluasan dan kecepatan penyebaran Covid-19, di mana masyarakat adalah subyek dari penularan virus Covid-19 itu sendiri.

Masyarakat yang telah terinfeksi dapat diberikan pertolongan dengan memberlakukan protokol kesehatan, sehingga tidak tercampur dengan mereka yang belum terinfeksi, serta memberlakukan penetapan kedaruratan kesehatan. Penanganan diatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Kapasitas daya tampung terhadap penanganan pasien yang terinfeksi Covid-19 harus ditambah sesuai dengan jumlah pasien yang terinfeksi. Sarana prasarana termasuk tenaga kesehatan disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka penanggulangan penyebaran virus tersebut. Selain hal tersebut di atas, diharapkan adanya kesadaran masyarakat dalam menerapkan hidup bersih, menjalankan segala ketentuan dan peraturan yang terkait penanggulangan penyebaran Covid-19 yang kita kenal dengan protokol kesehatan yang mengacu pada protokol kesehatan *World Health Organisation* (WHO).

Tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 tercatat per akhir Desember 2020 yaitu 504 petugas yang terdiri dari 237 dokter umum, 15 dokter gigi, 171 perawat, 64 bidan, 7 apoteker dan 10 tenaga laboratorium medik⁵. Hal tersebut menunjukkan tingginya risiko penularan Covid-19 kepada para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan terhadap pasien yang

⁴ <https://www.merdeka.com/trending/inilah-dampak-panjang-dari-virus-corona-bagi-kesehatan-tubuh-kin.html?page=3> diunduh pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 8:31 WIB.

⁵ <https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/04/193000323/kematian-tenaga-medis-indonesia-akibat-covid-19-tertinggi-di-asia-kenapa-?page=all> diunduh pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 14:05 WIB.

terinfeksi. Diperlukan perhatian kepada para tenaga medis tersebut agar tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan tetapi tetap tercegah dari penularan Covid-19. Akan sulit dibayangkan apabila mereka yang menjadi salah satu kunci dalam penanganan dan pelayanan kesehatan berkurang dan habis akibat tertular baik dari pasien maupun orang yang tanpa gejala. Perlindungan terhadap tenaga medis menjadi sangat penting agar percepatan pemulihan kesehatan akibat pandemi, maupun penyakit lainnya dapat tertangani secara baik.

Selain itu Kemampuan daya tampung di Rumah Sakit pemerintah maupun swasta terus mengalami keterbatasan akibat tingginya okupasi kamar rumah sakit dalam menampung pasien terinfeksi Covid-19. Hal ini merupakan rentetan dari masih tingginya penularan dan terinfeksinya masyarakat oleh virus Covid-19. Berdasarkan data untuk wilayah Jakarta pada bulan September 2020 bahwa kasus aktif sejumlah 11.245 kasus, dihadapkan dengan daya tampung rumah sakit hanya mampu menyediakan ruang isolasi 4.503 kamar atau hanya mampu 40 persen dari jumlah pasien⁶. Hal tersebut diperlukan upaya serius untuk dicarikan solusi pemecahannya dengan melibatkan seluruh unsur baik pemerintah maupun swasta guna perawatan dan pemulihan kesehatan pasien Covid-19. Kesehatan masyarakat maupun kesehatan para tenaga kesehatan merupakan hal utama yang harus segera dilaksanakannya upaya secara komprehensif agar perkembangan Covid-19 segera dapat dikendalikan.

Dampak Covid-19 terhadap bidang pendidikan menyebabkan metode pembelajaran yang sebelumnya dengan tatap muka antara guru dan murid, maka saat ini telah bergeser menjadi metode pendidikan jarak jauh dengan menggunakan sarana internet. Hal ini sangat bergantung pada gelaran jaringan internet di Indonesia yang belum merata sampai tingkat daerah pelosok negeri. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat dari Covid-19 mulai dari pengajar sekolah, wali murid sekolah, murid sekolah hingga pemangku kebijakan. Hal ini tentu saja telah mengubah tatanan hidup manusia, dan menyadarkan pentingnya akan perubahan pada sistem pembelajaran di Indonesia. Keterjangkauan masyarakat dalam memiliki sarana komunikasi seperti *gadget* sebagai sarana pembelajaran jarak jauh

⁶ <https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/10/130200923/icu-jakarta-menipis-ahli-ingatkan-rumah-sakit-di-indonesia-perlu-waspada?page=all> diunduh pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 14:30 WIB.

masih minim. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, bahwa pada Maret 2020, ada peningkatan jumlah penduduk miskin Indonesia dengan angka 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019. Penambahan tersebut membuat jumlah penduduk miskin Republik Indonesia tercatat sebanyak 26,42 juta jiwa⁷. Hal tersebut merupakan kendala yang dialami masyarakat dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh. Namun demikian tetap haruslah diupayakan pengatasannya agar anak-anak sekolah tetap mendapatkan ketuntasan belajar dan menyerap pengetahuan untuk mendukung penyiapan masa depannya, karena masa depan negara tergantung kepada kualitas anak-anak saat ini.

Dengan adanya PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah, menyebabkan proses pendidikan dilaksanakan melalui jarak jauh. Dimana pengertian pendidikan jarak jauh sesuai Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan beragam sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Maka dari sini diharapkan pemerintah mampu meng-creat bagaimana mewujudkan sarana dan prasarana teknologi, komunikasi dan informasi serta media lainnya tersebut untuk dapat mendukung adanya proses pendidikan jarak jauh. Hal tersebut harus mampu mewujudkan hak kesamaan seluruh bangsa Indonesia untuk mendapatkan mutu pendidikan yang baik. Selain pemerintah, maka sesuai Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 juga telah mewajibkan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan terutama pada bentuk sumber daya⁸.

Adapun pada bidang ketahanan pangan, akibat Covid-19 yang dirasakan adalah penurunan ketahanan pangan nasional. Pernyataan ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi, yang menyatakan terkait indeks ketahanan pangan nasional telah terjadi penurunan sebesar 4 poin sehingga menjadi 40,10 pada dua bulan pertama setelah pandemi muncul⁹. Selain itu, dikhawatirkan apabila pandemi tersebut

⁷ <https://money.kompas.com/read/2020/07/15/150436926/bps-dampak-covid-19-penduduk-miskin-naik-jadi-2642-juta-orang?page=all> diunduh pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 9:25 WIB

⁸ Pasal 8 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁹ <https://industri.kontan.co.id/news/di-tengah-pandemi-covid-19-ketahanan-pangan-indonesia-disorot> diunduh pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 9:40 WIB

berlangsung lama maka akan mengakibatkan krisis pangan di tanah air. Fakta bahwa saat ini Indonesia juga masih mengandalkan impor pada beberapa komoditi pangan, menambah kekhawatiran tadi apabila tidak segera dilaksanakan upaya pengatasannya. Menurut Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa terdapat tiga bahan pangan nasional yang mengandalkan impor. Barang tersebut diantaranya yaitu gula, bawang putih, dan daging sapi dari sebelas kebutuhan pokok yang diawasi ketat. Kesebelas kebutuhan pokok tersebut yang diawasi ketat oleh pemerintah yaitu beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging kerbau/sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, serta minyak goreng¹⁰. Kondisi tersebut apabila dihadapkan dengan keterbatasan penghasilan masyarakat miskin maka akan ada penyesuaian baru dimana adaptasi dengan pola hidup baru yang lebih hemat akan terjadi. Hal ini tentu saja akan sulit bila dibenturkan dengan kondisi masyarakat yang masih memiliki anak kecil dengan kebutuhan asupan nutrisi tinggi.

Food and Agriculture Organization (FAO) telah memperingatkan kepada negara-negara terkait adanya ancaman krisis. Pandemi Covid-19 telah memukul ekonomi masyarakat utamanya pada kelas menengah kebawah. Hal ini tentu saja membuat ketahanan pangan menjadi hal yang utama¹¹. Maka diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi guna memastikan ketersediaan pangan. Hal tersebut sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia¹².

Dampak penyebaran Covid-19 di atas, juga dialami oleh negara-negara di dunia, yang telah mengakibatkan perlambatan perekonomian. Hal ini berpengaruh terhadap proses pembangunan dari negara-negara di dunia tersebut, yang sedang mengalami stagnan dan bahkan beberapa diantaranya mengalami resesi akibat adanya pandemi Covid-19, termasuk negara Republik Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada ketahanan nasional Indonesia hingga pada level yang memprihatinkan, apabila tidak segera dicarikan solusi yang tepat. Solusi

¹⁰ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200416125906-4-152379/3-bahan-pokok-ini-ri-belum-merdeka-dari-impor> diunduh pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 9:56 WIB

¹¹ <https://lokadata.id/artikel/pandemi-korona-ancam-ketahanan-pangan-indonesia> diunduh pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 10:01 WIB

¹² Diktum meninmbang point b. UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

tersebut harus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah serta berbagai pihak yang terkait baik dari swasta, lembaga non pemerintah, termasuk partisipasi dari masyarakat. Untuk itu penulis menitikberatkan pada konsep pemecahan masalah guna meningkatkan ketahanan nasional akibat pengaruh Covid-19, diperlukan skala prioritas atau *refocusing* pada rencana pembangunan nasional, diantaranya adalah fokus pada peningkatan pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan ketahanan pangan. Hal tersebut merupakan bagian yang nantinya akan mendukung pemulihan dan kebangkitan dari pembangunan pada bidang lainnya.

2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan Taskap ini adalah **“Bagaimana Optimalisasi pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19?”**

Merujuk pada penjelasan kondisi di atas, maka terdapat sejumlah pertanyaan kajian yang harus ditelaah lebih lanjut, yaitu:

- a. Bagaimana Optimalisasi pembangunan nasional bidang kesehatan dalam era pandemi Covid-19?
- b. Bagaimana Optimalisasi pembangunan nasional bidang pendidikan dalam era pandemi Covid-19?
- c. Bagaimana Optimalisasi pembangunan nasional bidang ketahanan pangan dalam era pandemi Covid-19?

3. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran pembangunan nasional, analisis dan rekomendasi (pemecahan masalah) terhadap permasalahan pembangunan nasional dalam era pandemi Covid-19
- b. Tujuan penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kepentingan guna memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan upaya-upaya strategis untuk mewujudkan

optimalisasi pembangunan nasional di bidang kesehatan, pendidikan dan ketahanan pangan dalam era pandemi Covid-19.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. **Ruang Lingkup.** Adapun ruang lingkup dalam penyusunan Taskap ini akan dibatasi pada optimalisasi pembangunan nasional di bidang Kesehatan, pendidikan dan ketahanan pangan sebagai bagian dari kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka memelihara kemampuan *survive* dalam kerangka memelihara kondisi ketahanan nasional.

b. **Sistematika.** Untuk menyederhanakan penulisan dan memahami permasalahan serta analisis pemecahan masalah yang akan diuraikan dalam pembahasan, maka penulisan Taskap ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Bab I: Pendahuluan, Bab ini membahas latar belakang masalah tentang optimalisasi pembangunan nasional dalam era pandemi Covid-19 dalam rangka ketahanan nasional;
- 2) Bab II: Tinjauan Pustaka, di Bab ini disampaikan beberapa landasan pemikiran yang digunakan untuk menganalisis rumusan permasalahan pada Bab I meliputi peraturan perundang-undangan, data dan fakta yang mendukung penelitian, kerangka teoritis yang mendukung analisis permasalahan serta situasi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap permasalahan yang diteliti.
- 3) Bab III: Pembahasan, Bab ini menganalisis data, fakta dan konsep optimalisasi pembangunan nasional dalam era pandemi Covid-19 dalam rangka ketahanan nasional ditinjau dan dibahas dengan menggunakan teori, peraturan dan undang-undang yang terkait guna menemukan solusi dari pertanyaan di Bab I;
- 4) Bab IV: Penutup, Bab ini membahas kesimpulan dari uraian penulisan pada Bab III dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan terhadap permasalahan optimalisasi pembangunan

nasional dalam era pandemi Covid-19 dalam rangka ketahanan nasional.

5. **Metode dan Pendekatan.**

a. **Metode.** Penulisan Taskap ini menggunakan metode deskriptif analisis dalam melakukan kajian dan pembahasan terkait optimalisasi pembangunan nasional dalam era pandemi Covid-19 dalam rangka ketahanan nasional. Hal ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis berbagai data dan fakta, serta informasi lingkungan strategis yang ada.

b. **Pendekatan.** Taskap ini disusun dengan pendekatan perspektif kepentingan nasional dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memformulasikan kebijakan yang tepat dalam pelaksanaan optimalisasi pembangunan nasional dalam era pandemi Covid-19 dalam rangka ketahanan nasional, dengan analisis deskriptif secara menyeluruh terhadap pokok permasalahan dan solusi strategis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

6. **Pengertian.**

a. **Ketahanan pangan.** Ketahanan pangan ialah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya¹³

b. Ketahanan Nasional Indonesia merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar yang dapat membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa, negara Indonesia.¹⁴

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Ketahanan_pangan diunduh pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 23:08 WIB

¹⁴ Tim Pokja Ketahanan Nasional, 2021, Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional, ISBN: 978-602-14873-6-5, Jakarta, Lemhannas RI.

- c. **Pandemi.** Pandemi yaitu wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas¹⁵.
- d. **Protokol kesehatan.** Protokol kesehatan memiliki pengertian aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi Covid-19¹⁶.



¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PANDEMI> diunduh pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 22:45 WIB

¹⁶ <https://tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3W3> diunduh pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 23:17 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. **Umum.** Mengalir dari pernyataan tersebut di atas, maka pada Bab II ini disajikan beberapa tinjauan pustaka dalam bentuk peraturan perundang-undangan, fakta dan data, landasan teori, serta dinamika lingkungan strategis sebagai analisis dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada pada Bab III dalam rangka mempermudah proses analisis permasalahan dan mencari upaya untuk memecahkan atau mencari solusi dari sejumlah permasalahan yang ditemukan selama melakukan penelitian, sehingga permasalahan yang terkait dengan optimalisasi pembangunan nasional Indonesia pada era pandemi Covid-19 dalam rangka ketahanan nasional.

8. Peraturan Perundang-Undangan.

a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Khusus Pendidikan Jarak Jauh diatur pelaksanaan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, bersinergi untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional dapat berjalan sebagaimana yang sudah ditetapkan, sesuai dengan peran, hak dan kewajiban masing-masing.

b. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam rangka mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang aman, bermutu, cukup, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan mendayagunakan sumber daya, budaya lokal, dan kelembagaan adalah kewajiban Negara, hal ini diwujudkan dengan memperhatikan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri.

c. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Untuk mencegah adanya penyebaran Covid-19 dilaksanakan dengan memperhatikan kewenangan, tugas dan tanggungjawab antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan yang diatur dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2014 ini.

d. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Bahwa dalam undang undang ini berisi tentang upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumberdaya, peran serta masyarakat dan kerjasama internasional.

e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Peraturan ini mengatur tentang cadangan pangan pemerintah dan cadangan pemerintah daerah, perbaikan gizi masyarakat dan penganekaragaman pangan, kesiapan krisis pangan dan penanggulangannya, perdagangan, distribusi pangan dan bantuan pangan, pengawasan, sistem informasi gizi dan pangan serta peran serta masyarakat. Aksi tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu masyarakat dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi maupun kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pembatasan yang dimaksud adalah minimal dilaksanakan dengan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Peraturan ini mengatur kepada meminimalisir kegiatan pada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang menyebabkan klaster baru penyebaran Covid-19.

- g. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)*. Keputusan ini memuat hal penetapan Covid-19 adalah jenis penyakit yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 15/Permentan/ HK.140/4/2015 tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2015. Merupakan panduan Desa Mandiri Pangan sebagai standar tolok ukur pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan aktivitas-aktivitas prioritas nasional.
- i. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 16/Permentan/ HK.140/4/2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2015. Kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan melaksanakan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat merupakan upaya untuk mewujudkan stabilisasi harga pangan di tingkat petani dan Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani dengan cara: pengembangan unit-unit usaha (unit usaha pemasaran atau distribusi atau pengelolaan dan pengolahan cadangan pangan) dan pembangunan sarana penyimpanan milik Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses masyarakat terhadap sumber pangan.
- j. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 17/Permentan/ HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015. Kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat adalah mewujudkan penyediaan cadangan pangan untuk mendekatkan akses pangan masyarakat terutama anggota kelompok lumbung pangan, dengan

melaksanakan pembangunan sarana prasarana lumbung bersumber dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dan pengisian cadangan pangan dan pengembangan kelembagaan kelompok melalui dana dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian. Kegiatan ini diselenggarakan dengan: pemberdayaan kelompok agar dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan cadangan pangan, optimalisasi sumberdaya yang tersedia dan penguatan kapasitas kelembagaannya. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat dikembangkan cadangan pangan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

k. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 18/Permentan/ HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015. Sebagai pedoman dalam upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang yang dihasilkan dari lahan pekarangan di sekitar rumah/lingkungan, dimana hal tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dan pendapatan bagi keluarga.

l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Merupakan upaya Kementerian Kesehatan RI guna menciptakan masyarakat dengan derajat kesehatan setinggi-tingginya yang dituangkan dalam sebuah rencana strategis Kementerian Kesehatan pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2024, yang berisi dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.01/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Kementerian Keuangan selama periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun

2020 sampai dengan tahun 2024, memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, kelembagaan dan target kinerja, kerangka regulasi serta kerangka pendanaannya.

n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2020-2024. Salah satu tugas yang telah ditetapkan dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan adalah mewujudkan pendidikan yang eleven dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi, dengan menetapkan tujuannya yaitu: pengembangan akses pendidikan bermutu bagi peserta secara inklusif dan berkeadilan, penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik, pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter, pelestarian dan pemajuan kebudayaan, bahasa dan sastra serta pengurus utamanya dalam pendidikan, serta penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

o. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 259/KPTS/RC. 020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Merupakan penetapan rencana kerja dan merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja serta memuat isu strategis serta kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi implikasinya. Adapun misi kementerian pertanian yang telah ditetapkan pada kurun waktu 2020-2024 adalah mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasana kementerian pertanian.

9. Kerangka Teoritis.

a. **Teori Pembangunan.** Teori Walt. W. Rostow membahas tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ada lima tahap pertumbuhan nasional menurut Walt. W. Rostow, yaitu:

- 1) Tahap masyarakat tradisional Menurut Rostow, masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang fungsi produksinya masih terbatas. Hal tersebut ditandai dengan cara produksi yang masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional (adat istiadat).
- 2) Tahap prasyarat untuk lepas landas. Tahap ini merupakan tahap transisi di mana masyarakat mulai untuk mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kekuatan sendiri.
- 3) Tahap tinggal landas. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi mulai terjadi. Sebuah pertumbuhan ekonomi harus terlihat dengan adanya suatu perubahan drastis dalam masyarakat.
- 4). Tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan adalah tahap di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan berbagai teknologi modern pada hampir seluruh sektor kegiatan produksi.
- 5) Tahap konsumsi tinggi. Tahap konsumsi tinggi merupakan tahap terakhir dari teori pertumbuhan ekonomi Walt. W. Rostow. Pada tahap ini, masyarakat telah berkembang secara mandiri. Selain itu, masyarakat juga mulai menekankan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan konsumsi kesejahteraan, bukan lagi masalah produksi.¹⁷

- b. **Teori Optimalisasi.** Menurut Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons (2009), optimalisasi sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya dilaksanakan secara efektif dan efisien. Senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.¹⁸

¹⁷ <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-319.pdf>, diunduh pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 19:39 WIB

¹⁸ Singiresu S Rao, John Wiley, & Sons. 2009. *Engineering Optimization: Theory and Practice*, Fourth Edition.

10. Data dan Fakta.

Perkembangan pembangunan nasional mengalami keterlambatan akibat adanya perencanaan dan penataan ulang dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang untuk difokuskan dalam penanganan dan pengendalian terhadap pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui data dan fakta berikut ini.

a. Data. Pada awal Februari 2021, setidaknya terdapat 10.827 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan tersebut membuat angka capaian hingga 1.157.837 orang, dengan kematian berjumlah 31.556 orang. Angka tersebut dihitung sejak diumumkannya kasus perdana, dengan data pasien *suspect* Covid-19 berjumlah 76.029 orang¹⁹. Tenaga kesehatan yang telah meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 per akhir Desember 2020 adalah 504 petugas yang terdiri dari 237 dokter umum, 15 dokter gigi, 171 perawat, 64 bidan, 7 apoteker dan 10 tenaga laboratorium medik²⁰. Berdasarkan data untuk wilayah Jakarta pada bulan September 2020 bahwa kasus aktif sejumlah 11.245 kasus, dihadapkan dengan daya tampung rumah sakit hanya mampu menyediakan ruang isolasi 4.503 kamar atau hanya mampu 40 persen dari jumlah pasien²¹.

Selanjutnya, merujuk kepada kesadaran terkait pencegahan Covid-19, saat ini dinilai kurang maksimal. Merujuk kepada survei yang dilakukan AC Nielsen bekerja sama dengan UNICEF di Indonesia terkait perilaku 3M pada akhir tahun 2020 menunjukkan 31,5% dari responden melakukan seluruh perilaku 3M secara disiplin. Selanjutnya diperoleh juga 36% dari seluruh responden hanya melaksanakan dua dari perilaku 3M dan 23,2% melakukan 1 dari perilaku 3M. Sementara itu, 9,3% dari responden tidak melakukan kepatuhan 3M sama sekali.²²

¹⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/07/16153181/update-tambah-10827-kasus-covid-19-indonesia-kini-1157837-orang?page=all> diunduh pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 08:02 WIB

²⁰ <https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/04/193000323/kematian-tenaga-medis-indonesia-akibat-covid-19-tertinggi-di-asia-kenapa?page=all> diunduh pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 14:05 WIB.

²¹ <https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/10/130200923/icu-jakarta-menipis-ahli-ingatkan-rumah-sakit-di-indonesia-perlu-waspada?page=all> diunduh pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 14:30 WIB.

²² <https://news.detik.com/berita/d-5243808/hasil-survei-tunjukkan-kesadaran-masyarakat-soal-pencegahan-covid-19>

Terdapat peningkatan pada penduduk miskin Indonesia dengan angka 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019. Penambahan tersebut membuat jumlah penduduk miskin Republik Indonesia tercatat sebanyak 26,42 juta jiwa²³. Hal tersebut terkait dengan metode pembelajaran jarak jauh yang diputuskan oleh pemerintah dalam menyikapi perkembangan penyebaran Covid-19 yang sangat signifikan. Upaya pemerintah dengan mengurangi atau membatasi tatap muka dalam metode pembelajaran pada sistem pendidikan nasional, ternyata berdampak terhadap orang tua murid harus menyediakan gadget sebagai sarana belajar bagi putra putrinya, termasuk pemenuhan kebutuhan kuota yang tidak sedikit, telah menimbulkan efek baru bagi masyarakat kategori miskin. Hal ini diperkuat dengan adanya perusahaan yang terpaksa merumahkan tenaga kerjanya akibat memangkas biaya produksi untuk mengejar rasio neraca penjualan agar tetap seimbang.

Terkait indeks ketahanan pangan nasional telah terjadi penurunan sebesar 4 poin sehingga menjadi 40,10 pada dua bulan pertama setelah pandemi muncul²⁴. Ada kekhawatiran apabila pandemi masih berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka penyediaan pangan memerlukan upaya dari sekarang. Ketersediaan bahan baku pangan akan terkait dengan luas area atau lahan bahan baku pangan. Pada tahun 2019 berdasarkan data dari kementerian pertanian setelah dilaksanakan verifikasi maka luas lahan bahan baku pangan adalah 7.463.948 hektar²⁵.

b. Fakta. Dampak dari penyebaran Covid-19 terhadap bidang kesehatan adalah adanya peningkatan kebutuhan daya tampung dari rumah sakit dalam menyediakan kamar sebagai isolasi maupun perawatan terhadap pasien covid-19. Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 sangat riskan terhadap penularan baik oleh pasien yang ditangani maupun oleh orang umum di luar rumah sakit yang tanpa

²³ <https://money.kompas.com/read/2020/07/15/150436926/bps-dampak-covid-19-penduduk-miskin-naik-jadi-2642-juta-orang?page=all> diunduh pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 9:25 WIB

²⁴ <https://industri.kontan.co.id/news/di-tengah-pandemi-covid-19-ketahanan-pangan-indonesia-disorot> diunduh pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 9:40 WIB

²⁵ <http://agroindonesia.co.id/2020/02/luas-baku-sawah-jadi-746-juta-ha/> diunduh pada tanggal 24 Maret 2021 pukul 15:11 WIB.

gejala namun terinfeksi, demikian sebaliknya masyarakat memberikan stigma negatif terhadap para tenaga kesehatan, bahwa merekalah sebagai perantara penyebaran Covid-19 kepada masyarakat yang belum tertular. Adanya keengganan masyarakat untuk pergi ke rumah sakit baik dalam rangka mengidentifikasi apakah terinfeksi Covid-19 ataupun sekadar memeriksakan keluhan sakit yang diderita. Hal ini terjadi karena merasa bahwa rumah sakit salah satu sumber penularan, apalagi rumah sakit yang menangani pasien penderita Covid-19.

Pada bidang pendidikan, saat ini banyak kaum ibu yang merasa bebannya bertambah, karena selain mengurus keluarga sebagaimana biasanya sebelum ada pandemi, maka saat pemerintah menerapkan metode pembelajaran jarak jauh maka tugasnya bertambah untuk menyiapkan *gadget* dan sambungan internet serta mengajari putra putrinya belajar bagaikan seorang guru. Hal ini terjadi terutama bagi masyarakat menengah kebawah dengan putra putri usia sekolah TK sampai dengan kelas 3 atau kelas 4 SD relatif menyita waktu bagi para kaum ibu maupun orang tua pada umumnya. Apabila dihadapkan dengan adanya beberapa perusahaan yang melakukan perampingan karyawan, ada beberapa golongan masyarakat yang sangat terdampak oleh kejadian ini, satu sisi pekerjaan yang sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja sudah sangat minim apalagi ditambah saat ini di PHK, bagaimana mereka akan mencukupi kebutuhan anaknya yang sekolah dengan metode pembelajaran jarak jauh yang tentu saja memerlukan pemenuhan terhadap perlengkapannya. Minimal harus punya *gadget*, memenuhi kebutuhan kuat internet, belum lagi masyarakat yang berada di daerah terpencil dimana jaringan internet belum menyentuh wilayahnya. Masih adanya keterbatasan jaringan internet yang belum menjangkau pelosok negeri, merupakan kenyataan yang perlu dicarikan solusi. Kebiasaan tenaga pendidik atau guru yang selama ini menerapkan metode tatap muka dalam kegiatan belajar mengajar, tiba-tiba harus berhadapan dengan teknologi dan informasi yang memerlukan *skill* tersendiri. Adanya keraguan dan canggung bagi para pendidik ini dalam menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, terutama mereka yang masuk pada katagori gagap teknologi (Gaptekn).

Pada awal pandemi, kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan makanan pada kalangan masyarakat tertentu, telah mendorong mereka untuk melakukan pembelian besar-besaran terhadap bahan makanan, ada kepanikan pada masyarakat, dan memunculkan keinginan untuk memborong makanan secara membabi buta, tanpa menghiraukan bagaimana masyarakat lainnya juga membutuhkan. Hal tersebut tentu tidak bisa dilakukan oleh masyarakat dengan penghasilan kecil.

Adanya keterpurukan perekonomian yang dialami masyarakat dikarenakan adanya pengurangan maupun perumahan karyawan baik pada sektor perindustrian, pariwisata dan perhotelan, serta usaha dibidang lainnya, dihadapkan terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang membatasi kegiatan masyarakat untuk mencari nafkah dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya sedikit banyak ikut terdampak. Pemenuhan kebutuhan pokok menjadi dasar pemikiran bagi masyarakat apabila pandemi berlangsung lama, sementara kemampuan daya beli yang terus menurun. Hal ini memicu kesadaran terhadap pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri. Hal ini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong disekitar lingkungan tempat tinggalnya untuk dikelola menjadi kebun ataupun taman dengan berbagai tanaman pangan, sayur dan buah-buahan serta mengembangkan ternak dan perikanan. Tidak hanya pada masyarakat, hal tersebut juga diterapkan di beberapa instansi pemerintah seperti TNI Polri, kementerian dan Lembaga di kantor-kantor pemerintahan dengan mengelola lahan yang masih kosong untuk dimanfaatkan sebagai sumber cadangan makanan.

Adanya pandemi telah memberikan ide kepada masyarakat untuk memanfaatkan setiap jengkal ruang agar dapat difungsikan sebagai lahan untuk berkebun dan beternak dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, baik dengan dikonsumsi sendiri maupun dijual dan dibeli bahan makanan yang dibutuhkan. Masih luasnya lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah, khususnya di luar Jawa untuk dikembangkan sebagai lumbung bahan baku makanan, maupun dalam pemenuhan kebutuhan gizi bagi masyarakat, merupakan tantangan tersendiri untuk memunculkan inovasi untuk membangun ketahanan pangan dengan

mandiri. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemanfaatan lahan tidur oleh beberapa masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif penyediaan kebutuhan pangan, adanya ketertarikan masyarakat untuk menanam buah, sayur dan beternak baik ayam maupun ikan dengan memanfaatkan barang bekas yang masih dapat dipergunakan, metode penanaman dengan *hydroponik*, maupun inovasi menanam di atas media air.

11. **Perkembangan Lingkungan Strategis Pengaruh Penyebaran Covid-19 Terhadap Pembangunan.**

Perkembangan lingkungan strategis terkait penularan Covid-19 telah berdampak kepada pembangunan baik bidang kesehatan, pendidikan maupun ketahanan pangan pada tingkat global, regional dan nasional. Untuk mengetahui perkembangan di bidang tersebut disajikan beberapa dinamika sebagai berikut:

a. **Global.** Perkembangan penyebaran Covid-19 yang begitu cepat meluas sampai ke seluruh dunia maka disebut pandemi, telah mempengaruhi beberapa negara dalam menerapkan kebijakannya. Mereka berkonsentrasi bagaimana menghentikan laju penyebaran dengan segala aset yang dimilikinya. Pencegahan pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat, hal ini terlihat di Bandara penerbangan Internasional pada kedatangan maupun keberangkatan. Pembatasan bepergian ke suatu negara sementara ditanggguhkan sampai dengan adanya kebijakan pemerintah berikutnya.

Keterkejutan beberapa negara terkesan lambat di saat mengetahui begitu cepat penyebaran Covid-19, dengan menimbulkan korban jiwa yang tidak bisa dianggap ringan. Sampai dengan Taskap ini ditulis perkembangan terakhir menunjukkan angka kasus keseluruhan mencapai 124 juta kasus, sedangkan yang sembuh 70,6 juta jiwa sedangkan yang meninggal mencapai 2,74 juta jiwa²⁶. Hal ini terjadi terhadap 155 negara di dunia, sehingga menyebabkan keputusan bahwa peristiwa ini merupakan pandemi.

²⁶ <https://www.google.co.id/search?q=korban+covid-19+dunia> diunduh pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 06:57 WIB

World Health Organisation (WHO) telah bertindak melalui fungsinya untuk memberikan respon terhadap kedaruratan Kesehatan dunia secara global sebelumnya yaitu seperti Ebola di Afrika Barat pada Tahun 2014, wabah Zika pada Tahun 2016 dan saat ini wabah pandemi Covid-19. Mereka memutuskan kapan alarm global semasa wabah diaktifkan, merencanakan riset dan pengembangan secara global serta mengirimkan ahlinya untuk mencari dan mendapatkan data terhadap penyakit lebih mendalam. Namun demikian, WHO hanya lembaga penasihat, yang memberikan rekomendasi kepada negara negara anggota tentang segala hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan guna meningkatkan Kesehatan sekaligus mencegah penyebaran wabah²⁷.

Beberapa negara menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah laju perkembangan Covid-19 mulai dari penerapan pembatasan sosial atau lebih dikenal dengan *social distancing* atau *physical distancing*, sampai adanya pemberlakuan *lockdown*. Beberapa negara menerapkan kebijakan menutup sekolah, menutup restoran, melarang kepada warganya mendatangi tempat ibadah, tempat wisata serta melarang melakukan pertemuan langsung atau kerumunan massal, membatasi pergerakan massal dan mengurangi operasional transportasi massal²⁸. Hal ini berkibat beberapa perusahaan yang bergerak pada pelayanan umum terpaksa harus merencanakan ulang kebijakannya, mulai dari mengurangi biaya produksi dengan merumahkan sejumlah karyawannya, menurunkan jumlah produksi maupun distribusinya, bahkan ada yang sampai pada menutup usahanya.

Hal ini telah memicu pula terhadap angka kemiskinan dunia dimana pada tahun 2021 angka kemiskinan telah menunjukkan jumlah 150 juta orang atau sekitar 9,1 persen dari jumlah populasi di dunia, padahal sebelum pandemi diperkirakan hanya 7,9 persen dari populasi dunia berdasarkan data bank dunia²⁹. Hal tersebut menyebabkan beberapa negara di dunia

²⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52314496> diunduh pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 06:57 WIB

²⁸ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4245595/daftar-merek-besar-yang-terkapar-akibat-corona> diunduh pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 06:57 WIB

²⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54453523> diunduh pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 07:29 WIB

menerapkan kebijakan dan strategi ekonomi negaranya berbeda beda sesuai dengan tingkat keparahannya.

b. **Regional.** Sebagaimana negara-negara di dunia secara global telah terdampak oleh penyebaran Covid-19 yang cukup cepat, maka hal tersebut juga menimpa negara-negara di kawasan regional. Menurut laporan dari *Asian Development Outlook (ADO)* bahwa pertumbuhan ekonomi regional sebesar 2,2 persen pada tahun 2020 akan terkoreksi turun mencapai 3,3 poin persentasi jika dibandingkan dengan perkiraan dari *Asian Development Bank (ADB)* yaitu 5,5 persen pada September 2019³⁰. Penurunan ini tentunya merupakan imbas dari kemerosotan ekonomi secara global yang terjadi di beberapa negara di luar Kawasan Asia Tenggara. Sebagaimana diketahui bahwa negara-negara besar di dunia saja sangat kewalahan dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 ini, apalagi negara-negara di Kawasan Asia Tenggara yang notabene kebanyakan merupakan negara berkembang. Dampak yang cukup mengguncang dunia tersebut juga melanda negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Adapun perkembangan kasus Covid-19 di Asia Tenggara per tanggal 6 Desember 2020 menunjukkan di urutan pertama Indonesia dengan total kasus sebanyak 575.796 kasus, data yang sembuh menunjukkan 474.771 orang dan yang meninggal sebanyak 17.740 jiwa. Filipina sebagai urutan kedua mencatat 439.834 kasus, dengan jumlah sembuh sejumlah 408.634 orang dan meninggal dunia berjumlah 8.554 jiwa. Urutan kedua adalah negara Myanmar dengan jumlah kasus sebanyak 99.155 kasus, dengan kesembuhan 77.636 orang dan meninggal sebanyak 2.110 jiwa. Malaysia pada urutan keempat dengan total kasus 72.694 kasus, sembuh 61.273 orang dan meninggal dunia sejumlah 382 jiwa. Singapura pada urutan kelima dengan total kasus sejumlah 58.260 kasus, sembuh 58.160 orang serta meninggal dunia berjumlah 29 jiwa. Thailand di urutan keenam dengan total kasus 4.086 kasus, sembuh 3.853 dan meninggal sebanyak 60 jiwa. Pada urutan ketujuh ada negara Vietnam dengan jumlah kasus sebanyak 1.366

³⁰ <https://www.adb.org/id/news/developing-asia-growth-fall-2020-covid-19-impact> diunduh pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 07:55 WIB

kasus, sembuh 1.220 orang dan meninggal 35 jiwa. Untuk urutan kedelapan diduduki Kamboja dengan total kasus 346, sembuh 306 orang dan meninggal dunia belum ada. Pada urutan kesembilan, negara Brunei Darussalam dengan total kasus 151 kasus, sembuh 147 orang dan meninggal dunia sejumlah 3 jiwa. Laos pada urutan kesepuluh dengan total kasus sebanyak 39 kasus, sembuh 26 orang dan belum ada yang meninggal dunia pada kasus ini. Selanjutnya urutan terakhir adalah Timor Leste dengan total kasus 31 kasus, sembuh 30 orang dan belum ada yang meninggal pada kasus ini³¹.

Negara-negara di Kawasan telah terikat dalam organisasi ASEAN, di mana memiliki saluran untuk melaksanakan komunikasi diantara anggotanya terutama dalam menerapkan kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 lebih terkoordinasi dengan mengikuti ketentuan maupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO. Langkah-langkah yang telah dilakukan pada bidang kesehatan antara lain dengan menjalin komunikasi terkait perkembangan informasi terhadap cara dan pengalaman masing-masing negara dalam penanganan penyebaran Covid-19, perjalanan lintas negara, pelaporan berkala melalui *ASEA Bio Diaspora Virtual Centre* dan upaya komunikasi terhadap risiko serta dukungan penguatan laboratorium³².

Pada Sektor ekonomi di negara kawasan asia Tenggara hampir semua negara anggota merasakan dampaknya, terlebih yang menjadi pantauan saat ini bahwa yang paling kuat terdampak adalah Malaysia, dimana menurut informasi pada kuartal kedua tahun 2020 perekonomian Malaysia berkontraksi sampai 17,1 persen secara tahunan hal ini disebabkan adanya kebijakan penguncian wilayah atau *lockdown* untuk memperlambat penyebaran Covid-19, selain itu akibat menurunnya permintaan komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai salah satu unggulan ekspor Malaysia³³.

Pada sektor Pendidikan masih menerapkan metode pembelajaran jarak jauh dan belum mengizinkan untuk warganya melakukan kerumunan.

³¹ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/07/115000065/update-kasus-covid-19-asia-tenggara--indonesia-nomor-1-selisih-140.000?page=all> diunduh pada tanggal 25 Maret 2020 pukul 08:24

³² <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/strategi-asean-merespons-dampak-covid-19> diunduh pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 08:36 WIB.

³³ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200821141920-17-181140/dihantam-corona-ekonomi-negara-mana-di-asean-paling-tangguh> diunduh pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 08:43 WIB

Penggunaan metode baru dalam belajar mengajar dihadapkan pada kemampuan penyediaan infrastruktur jaringan internet, kuota internet serta *gadget* yang merupakan sarana dalam melakukan pendidikan dengan metode jarak jauh. Hal tersebut dihadapi oleh negara Asia Tenggara sebagai sebuah tantangan negara yang kebanyakan masih sebagai negara berkembang.

Terkait dengan ketahanan pangan, negara-negara ASEAN merupakan Kawasan penghasil pangan. Dan untuk pemenuhan kebutuhan pangan negara-negara ASEAN saling bergantung satu sama lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa di kawasan ASEAN ada Thailand dan Vietnam sebagai pengekspor beras. Negara importir beras terbesar yaitu Filipina, Malaysia dan Singapura. Sedangkan Negara eksportir jagung yaitu Kamboja, Myanmar dan Thailand. Tidak ada negara eksportir besar untuk kedelai, tetapi negara importir terbesar kedelai yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Negara eksportir besar gula adalah Thailand, sedangkan negara importir gula terbesar adalah Indonesia dan Malaysia³⁴.

c. **Nasional.** Penambahan angka kasus infeksi Covid-19 di Indonesia masih belum dapat dikendalikan secara sepenuhnya oleh pemerintah. Meskipun saat ini telah merevisi gerakan yang pada mulanya 3M menjadi 5M namun penyebaran Covid-19 masih terus berlanjut hingga pada saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya peningkatan penularan dengan terpaparnya masyarakat, yang dapat dimonitor dari laporan Kementerian Kesehatan terhadap penambahan kasus infeksi Covid-19 setiap harinya yang selalu bertambah, baik yang terkena maupun yang meninggal dunia, meskipun jumlah yang sembuh juga mengalami peningkatan. Kondisi tersebut telah banyak memberikan pengaruh terhadap capaian dari rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Indonesia pada periode pemerintahan 2019 – 2024 telah menetapkan beberapa pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan karakter serta

³⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/62042-ID-ketahanan-pangan-indonesia-di-kawasan-as.pdf> diunduh pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 08:59 WIB.

skill sumber daya manusia agar mampu mandiri dalam pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya alam buatan yang ada di wilayah tanah air.

Capaian pembangunan tersebut mengalami perlambatan akibat merebaknya pandemi Covid-19 di tanah air yang telah melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Kebijakan pemerintah guna mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 dengan melakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar dengan mempertimbangkan tingkat sebaran Covid-19 di masing-masing wilayah. Pemantauan perkembangan penyebaran Covid-19 dilaksanakan secara pemetaan dan pengklasteran atau zonasi. Pengalihan anggaran yang semula untuk mendukung target yang telah direncanakan, difokuskan untuk digunakan mendukung tanggap darurat, dengan menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan.

Percepatan pembangunan nasional akan dapat dilaksanakan apabila pemerintah telah mampu mengendalikan dan menghentikan penyebaran Covid-19 dengan berbagai cara yang harus ditempuh. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa penanganan terhadap pengendalian Covid-19 tidak mungkin bisa dilakukan sendiri, maka secara konsisten tetap melaksanakan kerjasama dengan negara tetangga, baik pada tingkat regional maupun tingkat internasional, terkait *sharing* penanganan, penerimaan bantuan APD dan adanya rencana impor vaksin. Hal ini dilakukan guna mempercepat pemutusan rantai penyebaran Covid-19 yang terjadi di tanah air.

Sebelumnya Indonesia telah memprediksikan pertumbuhannya pada tahun 2020 akan mengalami penurunan, dan benar bahwa pada kuartal pertama 2020 pertumbuhan ekonomi hanya 2,97 persen tetapi pada kuartal ketiga terkoreksi hingga 5,32 persen atau menjadi minus 2,35 persen. Pada kuartal ketiga ini memang banyak sektor usaha yang mengalami penutupan usaha dalam rangka mencegah peningkatan penyebaran Covid-19. Pada saat ada kebijakan pelonggaran terhadap pembatasan sosial berskala besar, kegiatan ekonomi berjalan dan kontraksi menjadi berkurang yang semula 5,32 persen menjadi 3,49 persen. Pada kuartal keempat Menteri Keuangan RI memperkirakan ekonomi masih dikisaran minus 2,9 sampai dengan minus 0,9

persen³⁵. Pemulihan ekonomi Indonesia sangat bergantung kepada kesiapan dan kesiagaan pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam memulihkan kesehatannya sekaligus menekan pertumbuhan laju penyebaran Covid-19.

Ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana prasarananya adalah salah satu kunci dalam pengentasan Indonesia dari jurang kemerosotan tingkat kesehatan akibat pandemi Covid-19. Tingkat okupasi kamar rumah sakit yang tinggi pada awal pandemi telah menyebabkan beberapa rumah sakit pemerintah dan swasta tidak mampu lagi menampung pasien dengan gejala Covid-19. Adanya kerja keras pemerintah melalui satuan tugas yang dibentuk baik pada tingkat pemerintah pusat dan daerah serta peran swasta dan masyarakat untuk menyediakan tempat penampungan isolasi bagi pasien tertular Covid-19 telah dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Adanya karakter gotong-royong yang menjadi karakter bangsa dimunculkan oleh situasi semacam ini.

Indonesia menerapkan kebijakan pembelajaran dari jarak jauh pada bidang Pendidikan, guna mencegah berkerumunnya masyarakat sehingga akan mengurangi risiko penularan. Hal tersebut diperlukan jaringan internet yang cukup stabil, penggunaan *gadget* seperti *hand phone*, tablet maupun *laptop* sebagai sarana pengguna dan juga diperlukan kepedulian orang tua dalam mengawasi, membimbing dan ikut mengajarkan kepada putra putrinya, terutama bagi mereka yang masih usia dini. Kemampuan pengajar atau tenaga pendidik harus *diupgrade* guna membiasakan dengan metode pembelajaran jarak jauh, setidaknya ada asistensi untuk hal tersebut. Selain itu, kondisi gelar jaringan internet saat ini belum mampu menembus pelosok desa dan daerah terpencil. Hal tersebut masih terus diupayakan oleh pemerintah untuk mendapatkan solusi yang terbaik sesuai kemampuan masing-masing wilayah.

Pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan, pemerintah Indonesia juga mengalami kendala akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar, hal itu telah mengganggu pada sektor distribusi dan pemasaran, karena adanya

³⁵ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020-2021> diunduh pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 07:35 WIB.

penutupan beberapa pasar, serta pembatasan pergerakan manusia dari satu daerah ke daerah lain. Sempat terjadi pemborongan bahan makanan oleh beberapa masyarakat di kota, karena terpengaruh oleh kejadian di luar negeri yang negaranya mengalami pandemi lebih dulu, dan dihadapkan dengan kekhawatiran terhadap stok kesediaan bahan makanan. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama setelah pemerintah mampu meyakinkan masyarakat tentang keamanan stok pangan dalam negeri.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Covid-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 telah membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan pola hidup di masyarakat. Virus yang muncul pertama kali di Kota Wuhan negara Tiongkok tersebut telah menyebar kepada hampir seluruh negara di dunia. Virus Covid-19 mempunyai nama biologi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2) dengan penyakitnya yaitu *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19). Covid-19 menyebar melalui pintu-pintu masuk pelabuhan, bandara udara maupun perbatasan darat antara negara.

Bahkan hingga pertengahan tahun ini, setidaknya telah ditemukan 5 jenis mutasi baru virus Covid-19. Mutasi tersebut berkembang sedemikian waktu dan menimbulkan permasalahan yang lebih rumit dalam penanganan penyebaran virus Covid-19. Jenis mutasi tersebut diantaranya yaitu mutasi B.1.222, mutasi B.1.619, D614G, mutasi B.1.1.7, mutasi B1.351, mutasi A.23.1, mutasi B.1.617.2 mutasi B1.1.317 dan mutasi N439K.³⁶ Merujuk kepada mutasi virus tersebut, Vietnam telah melakukan konfirmasi menemukan varian baru campuran dari varian Covid-19 India dan Inggris yang menyebar dengan cepat melalui udara.³⁷

Merujuk kepada aspek ketahanan nasional, Covid-19 memiliki dampak yang bila tidak disikapi dengan baik, dapat membawa kehancuran bagi sebuah negara. Dampak yang ditimbulkan contohnya diantaranya seperti resesi yang terjadi pada negara-negara seluruh dunia.³⁸ Bukan hanya Indonesia, bahkan negara-negara maju yang dianggap memiliki ekonomi kuat juga mengalami hal yang serupa. Merferensi catatan Bank Dunia tahun 2020, terjadi resesi akibat pandemi Covid-

³⁶ CNN Indonesia. 12 Maret 2021. "5 Mutasi Covid-19 Dunia Hingga RI, Lebih Menular dan Pintar". Pada <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210312141414-199-616717/5-mutasi-covid-19-dunia-hingga-ri-lebih-menular-dan-pintar/2> diakses pada tanggal 12 Mei 2021.

³⁷ Rizal, Jawahir Gustav. 29 Mei 2021. "Vietnam Temukan Mutasi Gabungan Virus Corona Varian Inggris dan India, Seberapa Bahaya?". Pada <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/29/150000265/vietnam-temukan-mutasi-gabungan-virus-corona-varian-inggris-dan-india?page=all> diakses pada tanggal 11 Mei 2021

³⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. "Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 : Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi". Pada Kemenkeu https://fiskal.kemenkeu.go.id/kem_ppkf_2021 diakses pada tanggal 12 Mei 2021.

19 menghantam 92,9 persen negara di dunia dan menjadi yang terburuk sejak tahun 1931.³⁹

Pada Indonesia sendiri, mulai dari akhir tahun 2020 hingga Q1-2021 masih terindikasi negatif sebesar 0,74%. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tiga bulan pertama 2021 tumbuh -0,96% dibandingkan kuartal sebelumnya (*quarter-to-quarter/qttq*). Sementara dibandingkan periode yang sama tahun lalu (*year-on-year/yoy*), ekonomi Indonesia tumbuh -0,74%.⁴⁰ Hal ini tentu akan membawa dampak tersendiri bagi kehidupan bermasyarakat didalam negeri. Dampak yang terjadi akibat dari resesi. Efek dari resesi ekonomi antara lain, angka pengangguran menjadi semakin tinggi, kesenjangan dan ketidaksetaraan meningkat tajam, pinjaman pemerintah melonjak naik, saat deflasi terjadi penurunan harga komoditas, dan ketika inflasi terjadinya peningkatan harga komoditas secara tajam.⁴¹

Selain resesi merujuk kepada penularan Covid-19 bila tidak diterapkan suatu kebijakan yang baik, maka penyebaran virus Covid-19 akan semakin masif di masyarakat. Contoh terakhir yang disebabkan oleh keganasan kasus Covid-19 ini adalah India. Hingga tanggal 13 Mei 2021, kasus rata-rata Covid-19 masyarakat di India adalah 365.030 kasus setiap minggunya. Selain itu, untuk total kasus korban jiwa yang meninggal hingga tanggal tersebut adalah 262.000 korban.⁴² Kepada angka kasus Covid-19 di India tersebut sangat mengkhawatirkan dan kapan saja dapat merambat kepada negara kawasan lain.

Merujuk kepada negara Indonesia, Pemerintah memerlukan sebuah terobosan kebijakan untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 agar tidak mengancam kepentingan negara kedepan. Saat ini, perlu adanya rencana *refocusing* Anggaran kebijakan dari rencana pembangunan jangka pendek dan

³⁹ Faqir, Anisyah Al. 12 November 2020. "Resesi Akibat Pandemi Covid-19 Hantam 92,9 Persen Negara di Dunia". Pada <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4406963/resesi-akibat-pandemi-covid-19-hantam-929-persen-negara-di-dunia> diakses pada tanggal 12 Mei 2021.

⁴⁰ Sembiring, Lidya Julita. 5 Mei 2021. "Masih Resesi! Pertumbuhan Ekonomi RI Q1-2021 Negatif 0,74%". Pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210505090813-4-243257/masih-resesi-pertumbuhan-ekonomi-ri-q1-2021-negatif-074> diakses pada tanggal 12 Mei 2021.

⁴¹ Yassaroh, Sitta Sakinatu. 6 November 2020. "Dampak Resesi Ekonomi, Indonesia Alami Beberapa Kerugian". Pada <http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2020/11/06/dampak-resesi-ekonomi-indonesia-alami-beberapa-kerugian-2/#:~:text=Dirinya%20mengatakan%2C%20dampak%20dari%20resesi,peningkatan%20harga%20komoditas%20secara%20tajam> diakses pada tanggal 12 Mei 2021.

⁴² Government of India. India Fights Corona COVID-19. Pada <https://github.com/CSSEGISandData/COVID19> diakses pada tanggal 12 Mei 2021.

menengah nasional. Perlunya Pemerintah dalam melakukan *refocusing* anggaran ditujukan untuk memulihkan negara akibat pandemi virus Covid-19 terutama pada aspek sosial. Aspek sosial merupakan salah satu aspek penting pada ketahanan nasional pancagatra. Selain itu, menjaga kestabilan kesejahteraan merupakan cita-cita bangsa ini. Hal ini dibuktikan pada Pancasila sila ke lima dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 alinea ke empat. Pada sila ke lima Pancasila berbunyi,

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Kemudian pada alinea ke empat pembukaan UUD NRI 1945 yaitu,

“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”

Setidaknya terdapat tiga bidang pada aspek sosial pembangunan yang penting dan pada tulisan ini akan dilakukan analisis secara mendalam. Ketiga aspek tersebut yaitu,

- a. Pembangunan Nasional bidang Kesehatan
- b. Pembangunan Nasional bidang Pendidikan
- c. Pembangunan Nasional bidang Ketahanan pangan

Pada masa kepemimpinan Joko Widodo periode ke-II yang berpasangan dengan Ma'ruf amin memiliki visi tahun 2019 – 2024 yang memiliki kolerasi dengan ketiga aspek tersebut. Aspek tersebut sesuai dengan visi yang membahas terkait,

- a. Peningkatan infrastruktur yang didalamnya mencakup infrastruktur persawahan.
- b. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang didalamnya mencakup terkait ketiga aspek.
- c. Mengupayakan meningkatnya investasi dalam Indonesia
- d. Melakukan reformasi birokrasi

e. Menjamin penggunaan APBN fokus dan tepat sasaran yang dimana ketika awal masuknya Pandemi Covid 19 ini pemerintah setidaknya telah melakukan beberapa *refocusing* anggaran yang berfungsi agar anggaran tepat guna serta tepat sasaran.

Sebagai langkah penyuksesan optimalisasi aspek diperlukan payung hukum kuat sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Payung hukum yang tidak tupang tindih seperti *Omnibus Law* dapat menjadi solusi terbaik di bidang reformasi hukum untuk memaksimalkan seluruh potensi nasional untuk menyelesaikan permasalahan pandemi Covid-19.

Ketiga aspek yang perlu dilakukan optimalisasi diatas menjadi fokus penting untuk menjaga eksistensi pembangunan suatu negara. Selain itu, tiga aspek tersebut menjadi pilar penting dalam aspek sosial yang perlu diperhatikan secara mendalam ketika pandemi Covid-19 seperti pada saat ini. Sebagai langkah Pemerintah Indonesia untuk memenuhi aspek tersebut, mulai Tahun 2020, pemerintah telah memfokuskan anggarannya terhadap bidang-bidang dengan resiko parah terdampak pandemi seperti aspek bidang kesehatan.

Merujuk kepada anggaran, pandemi membawa dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut membuat devisa negara tidak dapat menahan defisit anggaran bila pandemi semakin lama berlangsung. Berbagai cara dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencari solusi agar dapat mempertahankan anggaran keuangan yang dimiliki. Cara-cara tersebut seperti meningkatkan pendapatan di bidang perpajakan hingga melakukan hutang luar negeri. Solusi ini menjadi hal yang realistis bagi pemerintah selain melakukan *refocusing* anggaran guna memfokuskan penggunaan uang negara untuk sektor penting.

Kemudian, sebagai langkah yang kompetitif, Pemerintah Indonesia juga perlu untuk melakukan proteksi dalam pengelolaan keuangan. Proteksi ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Masih banyaknya oknum yang memanfaatkan kondisi ketika pandemi menyerang menjadi salah satu poin yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Contoh nyata dari permasalahan yang masih sering terjadi pada poin ini yaitu terjadinya korupsi dana bantuan sosial oleh menteri sosial, Juliari Batubara.

Percepatan pembangunan nasional di tengah pandemi Covid-19 diupayakan melalui optimalisasi pembangunan bidang kesehatan, optimalisasi bidang pendidikan, optimalisasi bidang ketahanan pangan, hingga pembatasan aktifitas masyarakat. Ketiga bidang tersebut diyakini akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, apabila dapat dikelola dengan baik dan benar. Untuk itu akan diuraikan permasalahan dan pembahasannya berdasarkan fakta, data, teori dan perkembangan lingkungan strategi dalam upaya menemukan solusi yang diyakini akan menunjukkan arah perbaikan yang signifikan.

13. **Optimalisasi Pembangunan Nasional Bidang Kesehatan Pada Era Pandemi Covid-19.**

Kemunculan pandemi Covid-19 menyebabkan permasalahan yang sangat serius serta berdampak luas terhadap beberapa sektor kehidupan masyarakat baik pada tingkat nasional, regional hingga internasional. Permasalahan pada pembangunan nasional bidang kesehatan dalam pandemi Covid-19 ini bagaimana pemerintah mampu menjamin kecukupan ruang rawat inap dan isolasi, memastikan kecukupan peralatan dan kelengkapan alat kesehatan, memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan, baik secara moril dan materiil serta mewujudkan masyarakat yang taat terhadap protokol kesehatan serta peraturan pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Meskipun permasalahan Covid-19 termasuk sebagai penyakit pandemi yang baru, sebenarnya Pemerintah Indonesia telah memiliki aturan terkait yang bila diterapkan dengan baik ketika itu maka penanganan Covid-19 dapat diatasi. Peraturan terkait Covid-19 yang memiliki kesinambungan dengan optimalisasi bidang kesehatan kemudian mulai berkembang sedemikian waktu yang merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak dari Covid-19. Aturan-aturan tersebut diantaranya seperti,

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease 2019* (Covid-19);
- d. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Meskipun telah terdapat kebijakan yang matang, namun implementasi di lapangan terkait kebijakan tersebut belum sepenuhnya telaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari masih meningkatnya jumlah masyarakat terpapar Covid-19 Indonesia setiap harinya. Selain itu, pada awal masuknya Covid-19 di Indonesia juga masih terdapat kebingungan oleh pemerintah meskipun aturan terkait karantina telah ada sebelumnya.

Kesehatan merupakan salah satu bidang yang paling disorot ketika virus Covid-19 mulai masuk ke dalam wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan, kesiapan Indonesia dalam menghadapi pandemi virus Covid-19 dirasa belum cukup ketika itu. Selanjutnya, lambatnya aksi pemerintah dalam membuat kebijakan tanggap darurat Covid-19 ketika itu membuat virus mulai menyebar ke berbagai wilayah Indonesia secara tidak terkontrol. Pemerataan nasional yang belum dicapai pada bidang kesehatan menjadi kendala yang terjadi ketika munculnya pandemi penyakit seperti virus Covid-19.

Optimalisasi dibidang kesehatan dalam penanganan pandemi Covid 19 dimulai dari tahapan antisipatif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif. Tahap awal terkait pencegahan (antisipatif) pada awal munculnya pandemi Covid 19 dinilai lambat dikarenakan adanya dilematis antara kesehatan dengan ekonomi adalah kebijakan pelarangan masyarakat untuk mudik lebaran. Di satu sisi Pemerintah melarang keras agar masyarakat melaksanakan mudik lebaran, namun disatu sisi Pemerintah Indonesia juga memperbolehkan masyarakat untuk melakukan rekreasi wisata. Kedua kebijakan tersebut pada akhirnya menimbulkan sebuah ambigu kebijakan yang membuat masyarakat di tataran bawah kebingungan.

Saat ini Pemerintah Indonesia diharapkan masih waspada terkait penularan dan penyebaran virus agar tidak menjadi gelombang tsunami Covid-19 lanjutan di Indonesia. Hal ini mengacu kepada catatan negara sekitar Indonesia dimana jumlah

penyebaran Covid-19 mulai terindikasi mengalami kenaikan kembali. Selain India, negara-negara kawasan tersebut yaitu Singapura dan Malaysia. Bahkan kedua negara tersebut sempat memberlakukan kebijakan *lockdown* nasional.⁴³ Hal tersebut menjadi Indikasi awal bahwa Pemerintah Indonesia haruslah selalu siap sedia dalam menghadapi ancaman virus Covid-19 ini.

Merujuk pada kasus harian Covid di Malaysia yang merupakan tetangga dekat Indonesia dapat mencapai 9.020 kasus pada tanggal 29 Mei 2021.⁴⁴ Selain itu, Malaysia juga telah melaporkan bahwa tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di ICU untuk pasien Covid-19 mencapai 104 persen pada hari Minggu Tanggal 6 Juni 2021.⁴⁵ Beda kasus lain dengan negara tetangga Indonesia yaitu Singapura dan Thailand yang mencatatkan kenaikan harian tertinggi kasus Covid-19.⁴⁶

Upaya antisipasi penularan Covid-19 di Indonesia perlu untuk diredam agar kejadian seperti pada negara kawasan tidak terjadi di Indonesia. Seperti contoh ketika ruang di rumah sakit India yang penuh, bahkan pasien yang mempunyai penyakit bawaan kritis tidak bisa mendapatkan pertolongan cepat karena keterbatasan ruangan unit gawat darurat. Selain itu, banyak dari masyarakat warga negara India mencoba keluar dari negaranya dengan menyewa pesawat pribadi agar ancaman Covid-19 parah yang melanda negara tersebut tidak menularinya.

Kasus di India dan negara kawasan lainnya tersebut perlu untuk dijadikan pelajaran agar Pemerintah Indonesia tetap melakukan antisipasi untuk tetap menjaga agar ruangan di tiap rumah sakit daerah tetap terpenuhi. Indonesia dapat melakukan upaya-upaya preventif dalam menghadapi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia sehingga dapat meminimalisir korban meninggal. Menurut penulis, sebagai upaya preventif menghadapi Covid-19 tersebut dapat dilakukan dalam beberapa hal seperti:

⁴³ Arbar, Thea Fathanah. 6 Mei 2021. "Covid Menggila di Asia: Singapura, Malaysia hingga Nepal". Pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210506163531-4-243855/covid-menggila-di-asia-singapura-malaysia-hingga-nepal> diakses pada tanggal 13 Mei 2021.

⁴⁴ Channel News Asia. 1 Juni 2021. "Makin parah, kasus harian COVID-19 Malaysia bisa tembus 13.000". Pada <https://internasional.kontan.co.id/news/makin-parah-kasus-harian-covid-19-malaysia-bisa-tembus-13000> diakses pada tanggal 13 Mei 2021.

⁴⁵ Isa. 10 Juni 2021. "Covid-19 Melonjak, BOR di Malaysia Tembus 100 Persen". <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210610155556-106-652758/covid-19-melonjak-bor-di-malaysia-bisa-tembus-100-persen> diakses pada tanggal 13 Mei 2021.

⁴⁶ Oke News. 14 Mei 2021. "Singapura dan Thailand Catat Kenaikan Harian Tertinggi Kasus Covid-19". Pada <https://news.okezone.com/read/2021/05/14/18/2410220/singapura-dan-thailand-catat-kenaikan-harian-tertinggi-kasus-covid-19> diakses pada tanggal 13 Mei 2021.

- a. Pemberlakuan kebijakan ketat terkait protokol kesehatan di masyarakat.
- b. Upaya peningkatan fasilitas rumah sakit seperti kecukupan ruang rawat inap dan isolasi.
- c. Upaya peningkatan kecukupan peralatan dan kelengkapan alat kesehatan.
- d. Pemenuhan jumlah tenaga kesehatan.
- e. Melakukan pemaksimalan produksi alat deteksi virus dan vaksin dalam negeri.
- f. Mengadakan Rumah Sakit Lapangan (*Mobile Hospital*).

Upaya pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka upaya preventif melawan pandemi Covid-19 yaitu pemberlakuan kebijakan yang mendukung upaya protokol kesehatan di masyarakat. Perubahan gerakan 3 M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) menjadi 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas) menjadi salah satu upaya baik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pelaksanaan 5 M ini tentu saja diikuti oleh kebijakan pengikut seperti;

- a. Internalisasi atau edukasi tentang pentingnya mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi termasuk dengan pola hidup sehat.
- b. Penyelenggaraan program wajib olahraga di seluruh desa dan Kecamatan untuk melaksanakan senam dan olahraga bersama 2 kali dalam seminggu.
- c. Mengadakan ceramah rutin tentang pola hidup sehat dan makan sehat kepada masyarakat.
- d. Membangun kebiasaan hidup sehat mulai dari keluarga dengan pemberian suri tauladan orang tua.
- e. Menyediakan obat-obatan di rumah berupa herbal maupun kimia sebagai *spesific protection*.

Selain itu, pemberlakuan pembagian waktu kerja seperti sistem *work from home* (WFH) juga masih diperlukan pada lingkungan perkantoran sebagai upaya minimalisir kontak antar orang. Bahkan saat ini terdapat ide dari Menteri Koordinator

Bidang Maritim dan Inventasi, Luhut Binsar Padjaitan, yang membuat program kerja *work from Bali*, dimana ide ini dikolaborasikan untuk meningkatkan perekonomian Bali yang hancur dikarenakan wisatawan sepi akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Sebagai antisipasi agar meminimalisir peningkatan angka pasien Covid-19, selain dari sisi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatannya juga perlu ditunjang dengan kesadaran masyarakat. Maka dari itu, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menunjang upaya poin pertama perlu ditambahkan langkah-langkah edukasi terhadap masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan diharapkan dapat meminimalisir penyebaran Virus Covid-19. Masyarakat harus mengikuti seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah karena secara langsung aturan tersebut dibuat untuk kebaikan bersama. Penggunaan masker dan *social distancing* pada pusat keramaian perlu diperketat untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19.

Upaya kedua yaitu peningkatan fasilitas rumah sakit seperti penambahan ruang rawat inap maupun ruang isolasi khusus pasien Covid-19. Seperti diketahui, selama masa pandemi Covid-19 setiap rumah sakit memerlukan ruang perawatan yang banyak dalam memenuhi keadaan pasien Covid-19 yang setiap harinya semakin bertambah. Hal ini tentu tidak semua rumah sakit di Indonesia memiliki jumlah ruang perawatan ideal khusus pasien Covid-19. Secara standar, pasien yang terindikasi Covid-19 tidak dapat dicampur dalam ruang perawatannya dengan pasien rumah sakit lainnya. Sebagai salah satu solusi yang dapat dipergunakan untuk memaksimalkan optimalisasi bidang ini, Pemerintah Indonesia dapat melakukan pemanfaatan Gedung, Wisma, kantor, sekolah, hotel untuk dijadikan ruang rawat inap dan isolasi. Selain itu, dalam rangka pemanfaatan komponen strategis yang dimiliki oleh Pemerintah untuk menghadapi pandemi, alat utama sistem seperti Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut juga dapat dijadikan solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan ruangan yang sangat mendesak pada saat ini. Hal tersebut tentu menjadi sebuah solusi dalam rangka pemanfaatan potensi komponen yang dimiliki oleh pemerintah guna menekan dampak yang timbul akibat pandemi Covid-19.

Merujuk kepada data tahun 2020, Jumlah rasio tempat tidur di Indonesia belum mampu untuk menampung masyarakat bila terjadi lonjakan angka pasien

Covid-19 yang besar seperti di India. Rasio tempat tidur rumah sakit di Indonesia yaitu sebesar 1,17 per 1.000 penduduk. Artinya, Indonesia hanya mempunyai 1 tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduknya. Angka ini sangat jauh dari memadai jika dibandingkan dengan Korea Selatan yang memiliki kurang lebih 11 tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk. Daerah yang memiliki tempat tidur terbanyak terdapat di DKI Jakarta. DKI Jakarta mampu menyediakan 2 tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduknya. (lihat tabel 3.1)

Selain pemenuhan tempat tidur dan ruang ICU pada rumah sakit daerah, perlengkapan peralatan kesehatan juga perlu diperhatikan. Hal yang perlu diperhatikan seperti menghitung ketersediaan stok peralatan yang dimiliki saat terjadi pandemi (misalnya ventilator, alat CRRT, pompa infus intravena, alat monitor) termasuk barang habis pakai yang sekali pakai (*single use*), dan lainnya. Selain itu logistik yang tersedia untuk pasokan, penyimpanan, dan pengadaan peralatan tambahan perlu diperhatikan juga selama masa pandemi pada saat ini.

Merujuk kepada permasalahan pada bidang ini, terdapat langkah-langkah strategis yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan optimalisasi di bidang kesehatan. Langkah-langkah strategis tersebut dalam rangka memenuhi perlengkapan Alat kesehatan diantaranya yaitu,

- a. Memberdayakan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) atau industri rumah/lokal untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan khusus penanganan virus atau Corona seperti APD (Alat Pelindung Diri) *face shield*, *gloves Hazmat*, sepatu boot kesehatan, *handskun* dan lain-lain.
- b. Melalui kementerian perindustrian membuat atau menentukan pendirian industri alat kesehatan secara terintegrasi di bawah bimbingan dan supervisi Kementerian Kesehatan.
- c. Bekerjasama dengan civitas akademi Universitas di Indonesia dalam pengembangan alat kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri.
- d. Mengembangkan inovasi secara terus-menerus peralatan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional.
- e. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pengembangan alat kesehatan.

Selanjutnya upaya ketiga yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan kecukupan peralatan dan kelengkapan alat kesehatan. Perlu adanya upaya untuk mendorong terwujudnya kemandirian dalam negeri untuk melakukan produksi alat kesehatan sendiri. Hal ini merujuk data nasional yang menyatakan bahwa 90% bahan baku obat-obatan yang beredar di Indonesia masih berasal dari impor, hal ini juga terjadi pada alat kesehatan yang harus diimpor sebanyak 94% dari kebutuhan.⁴⁷ Data tersebut tentu saja mengindikasikan kemandirian nasional terhadap kesehatan masih jauh dari kata baik.

Selanjutnya poin keempat yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam optimalisasi bidang kesehatan pada masa pandemi Covid-19 adalah jumlah tenaga kesehatan yang dapat diberdayakan selama masa pandemi Covid-19. Seperti diketahui, selama masa pandemi Covid-19 setiap rumah sakit memerlukan perawat yang banyak dalam memenuhi keadaan pasien Covid-19 yang setiap harinya semakin bertambah. Hal ini tentu perawat yang dimiliki oleh negara saat ini, belum memenuhi terhadap kondisi yang ada. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan kurangnya tenaga medis saat ini, diantaranya yaitu seperti memberdayakan residen, memberdayakan dokter umum dan merekrut para relawan kesehatan serta siswa/Pramuka yang bergabung kepada bidang kesehatan.

Pemenuhan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia termasuk salah satu yang lambat. Hal ini terlihat dari rasio tenaga medis di tiap daerah di Indonesia. Bahkan merujuk kepada data milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, satu orang tenaga kesehatan diharuskan mengawasi puluhan masyarakat. Hal tersebut belum ditambah dengan masalah geografis Indonesia yang berupa kepulauan sehingga akan lebih menyulitkan pergerakan tenaga kesehatan ketika berada di lapangan.

Tidak hanya daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal), bahkan kekurangan tenaga kesehatan juga dirasakan oleh daerah-daerah kota seperti Jakarta ketika terjadinya pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan masih harusnya pemerintah terutama di rumah sakit darurat wisma atlet mencari relawan tenaga

⁴⁷ CNBC Indonesia. 26 Maret 2021. "RI Masih Doyan Impor Alat Kesehatan Hingga Obat-obatan". Pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210325170435-8-232893/ri-masih-doyan-impor-alat-kesehatan-hingga-obat-obatan> diakses pada tanggal 13 Mei 2021.

kesehatan. Hal ini menjadi salah satu indikasi di mana regenerasi dan penambahan tenaga kesehatan di Indonesia masih sangat minim. (lihat tabel 3.2)

Diketahui pada tahun 2018, tenaga kesehatan hanya 14,15% dari total Pegawai Negeri Sipil secara nasional (PNS).⁴⁸ Angka tersebut tentu sangat minim, terlebih ketika menghadapi masa pandemi Covid-19 pada saat ini. Bahkan angka tersebut belum ditambah permasalahan terkait pemerataan tenaga kesehatan di daerah 3 T.

Merujuk kepada masalah pemenuhan tenaga kesehatan dimasa pandemi saat ini, Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategi untuk melaksanakan penyelenggaraan bidang kesehatan yang maksimal. Pada permasalahan ini, terdapat beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kurangnya tenaga medis saat ini. Solusi tersebut diantaranya seperti,

- a. Memberdayakan residen, dokter umum dan Siswa/siswi serta Parmuka yang sudah dibekali dengan penmgetahuan dan keterampilan tentang kesehatan. Solusi ini dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah darurat ketika masa pandemi atau penyakit yang disebabkan karena virus, seperti pada saat ini.
- b. Melakukan evaluasi peraturan ataupun perundang-undangan tentang kebijakan pemberian jaminan terhadap tenaga kesehatan dengan resiko tinggi seperti penanganan virus.
- c. Memberikan tunjangan khusus bagi tenaga kesehatan yang berkecimpung dengan penanganan virus. Penghargaan tunjangan berupa uang, beasiswa atau tunjangan jaminan kesehatan, dan beasiswa anak, istri atau suami.
- d. Agar diberikan penghormatan dan penghargaan, apabila ada tenaga kesehatan yang wafat berupa kemudahan tempat pemakaman, pengurusan administrasi kematian dan lain-lain.

Poin kelima dalam preventif pada masa pandemi Covid-19 adalah melakukan pemaksimalan produksi alat deteksi virus dan vaksin dalam negeri.

⁴⁸ Hartomo, Giri. 2 April 2019. "Hanya 14,15% dari Total PNS, Indonesia Darurat Tenaga Kesehatan?". Pada <https://economy.okezone.com/read/2019/04/02/320/2038110/hanya-14-15-dari-total-pns-indonesia-darurat-tenaga-kesehatan> diakses pada tanggal 13 April 2021.

Pemerintah Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak mulai dari lembaga riset hingga lembaga pendidikan. Cara yang dapat dilakukan tersebut dapat diterapkan dengan membuka perkuliahan jurusan biomedic. Jurusan ini masih jarang ditemukan pada universitas-universitas di Indonesia. Dengan mempelajari terkait hal tersebut, diharapkan mampu menemukan ilmu pengetahuan baru yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Beberapa lembaga di Indonesia saat ini telah mengembangkan ilmu ini sebagai upaya menemukan solusi terbaik dalam menghadapi pandemi Covid-19. Hal tersebut merupakan sebuah upaya mewujudkan kemandirian nasional bidang kesehatan harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar tidak tergantung kepada vaksin milik negara asing. Beberapa Universitas, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) hingga Badan Interlijen Negara (BIN) menjadi contoh lembaga-lembaga di Indonesia yang telah memulai proyek ini.

Solusi terhadap pandemi untuk saat ini telah dibuatnya vaksin buatan dalam negeri *Dendritic Immunotherapy Nusantara* (Dinus) dan Vaksin merah-putih. Vaksin Nusantara merupakan vaksin yang digagas oleh Terawan Agus Putranto yang ketika itu menjabat Menteri Kesehatan pada tahun 2020. Pendanaan untuk riset vaksin Nusantara didukung juga dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kemenkes. Vaksin ini adalah *rebranding* dari vaksin Joglosemar, vaksin Covid-19 berbasis sel dendritik yang dikembangkan oleh para ilmuwan dari Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, dengan menggandeng PT. Rama Emerald Multi Sukses (Rama Pharma) bekerja sama AIVITA Biomedical Inc asal California, Amerika Serikat.

Selain vaksin nusantara juga terdapat opsi vaksin buatan anak bangsa tersebut perlu dilakukan apresiasi dan pemberian dukungan oleh pemerintah. Vaksin dimaksud adalah vaksin merah putih. Vaksin Merah-Putih pada dasarnya tidak merujuk dari satu jenis vaksin saja, melainkan sekelompok kandidat vaksin yang dikembangkan oleh konsorsium riset di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN). Terdapat 7 lembaga yang ikut serta mengembangkan vaksin ini, yaitu,⁴⁹

⁴⁹ Pramudiarja, AN Uyung. 22 Februari 2021. "Vaksin Nusantara Vs Vaksin Merah Putih, Bedanya Apa Sih?". Pada <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5399932/vaksin-nusantara-vs-vaksin-merah-putih-bedanya-apa-sih> diakses pada tanggal 14 Mei 2021.

- a. Institut Teknologi Bandung (ITB). *Platform: Vector Adenovirus.*
- b. Universitas Padjadjaran (Unpad). *Platform: Protein recombinant.*
- c. Universitas Indonesia (UI). *Platform: DNA, mRNA, dan Virus-like-particles.*
- d. Universitas Gadjah Mada (UGM). *Platform: Protein recombinant.*
- e. Universitas Airlangga (Unair). *Adenovirus dan Adeno-Associated Virus-Based.*
- f. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. *Platform: Sub-unit protein rekombinan (mamalia) dan Sub-unit rekombinan (yeast).*
- g. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Platform: Protein recombinant.*

Kedua opsi Vaksin yang dikembangkan oleh anak bangsa tersebut seharusnya perlu untuk diapresiasi karena akan lebih memperbanyak opsi pilihan vaksin kedepan. Dengan pembuatan vaksin buatan anak bangsa, diharapkan mampu mewujudkan kemandirian dalam negeri terutama dibidang kesehatan pada masa pandemi penyakit Covid-19. Hal ini tentu membuat ketergantungan Indonesia dalam mengembalikan kondisi negara dari pandemi Covid-19 tidak bergantung kepada negara lain.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada orang-orang terdepan yang bekerja dalam upaya penanggulangan dampak Covid-19. Contoh nyata yang saat ini mendesak adalah vaksinasi terhadap tenaga kesehatan Indonesia. Hal ini didasari data bahwa tenaga kesehatan Indonesia yang meninggal akibat bertugas dalam penanggulangan Covid-19 memiliki jumlah terbesar kelima di dunia. Setidaknya sampai 27 Januari 2021, terdapat 647 Tenaga Kesehatan meninggal akibat Covid-19.⁵⁰ Korban dari tenaga medis yang meninggal tersebut bila dirinci yaitu 237 dokter, 15 dokter gigi, 171 perawat, 64 bidan, 7 apoteker, dan 10 tenaga laboratorium medik. Selanjutnya bila dirinci berdasarkan wilayah dapat dijabarkan yaitu Jawa Timur dengan 46 kasus kematian dokter, DKI Jakarta 37 kasus

⁵⁰ Aditya, Nicholas Ryan. 28 Januari 2021. "IDI: Hingga 27 Januari, 647 Tenaga Kesehatan Meninggal akibat Covid-19. Pada <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/09115011/idi-hingga-27-januari-647-tenaga-kesehatan-meninggal-akibat-covid-19> diakses pada tanggal 14 Mei 2020.

kematian, dan Jawa Tengah 31 kematian dokter dalam 10 bulan pandemi covid-19 di tanah air.⁵¹

Selain dari upaya vaksinasi, pemerintah juga harus terus melakukan *tracing* kepada masyarakat yang tertular virus Covid-19. Gagasan maupun terobosan dari anak bangsa perlu untuk ditingkatkan dalam pengembangan pada poin ini seperti pada halnya terobosan dalam pembuatan vaksin dalam negeri. Contoh terobosan yang baik adalah adanya pengembangan alat untuk deteksi orang yang terinfeksi Covid-19 yaitu *Genose* yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada. Melalui cara kerja yang lebih cepat, alat tersebut mampu mengidentifikasi virus corona dengan cara mendeteksi *Volatile Organic Compound (VOC)*.⁵²

Poin terakhir dalam optimalisasi bidang kesehatan pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan mengadakan Rumah Sakit Lapangan (*Mobile Hospital*). Keberadaan *Mobile Hospital* sangat efektif dan berdayaguna bagi daerah yang memiliki jumlah pasien terpapar Covid-19 cukup banyak, namun tidak memiliki Rumah sakit yang cukup atau tidak memiliki Rumah Sakit Khusus Covid-19 (pandemi akibat virus lainnya). Kapasitas ruang IGD, Isolasi dan perawatan bagi pasien Covid-19 yang dapat ditampung di *Mobile hospital* sangat memadai karena kapasitas *Mobile Hospital* berkisar antara 100 sampai 500 pasien.

Pengadaan *Mobile Hospital* dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Kesehatan kepada negara produsen seperti Amerika Serikat, Prancis, Rusia, China dan lain-lain. *Mobile Hospital* memerlukan lahan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan di suatu daerah. Namun keberadaan *Mobile Hospital* juga membutuhkan tenaga kesehatan, para medis, operator peralatan pendukung layaknya seperti sebuah rumah sakit pada umumnya. Sehingga hal ini sangat perlu diinformasikan, dikoordinasikan dan dikomunikasikan kepada *stake holder* terkait di wilayahnya agar dapat terpenuhinya personel yang dibutuhkan.

Setelah semua alur tahapan bidang kesehatan tercapai, terdapat hal penting pula yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia. Hal tersebut adalah kesehatan *health care life* yang juga merupakan kesehatan jiwa masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang dinyatakan positif tertular virus Covid 19. Hal

⁵¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210102172140-20-588766/idi-kematian-nakes-ri-tertinggi-ke-5-di-dunia>

⁵² <https://mipa.ugm.ac.id/2020/12/cara-kerja-genose-alat-deteksi-covid-19-buatan-ugm-yang-dapat-izin-edar/>

ini dikarenakan dengan jiwa yang bahagia diharapkan dapat meningkatkan kekuatan batin agar tetap ingin bertahan hidup (*survive*) dan meminimalisir dampak akibat meningkatnya beban pikiran karena virus tersebut. Selanjutnya dapat dilakukan koordinasi dengan kepala seluruh perusahaan maupun lembaga negara yang ada Indonesia untuk selalu mengingatkan pegawainya terkait protokol kesehatan. Terdapat hal-hal penting dalam penguatan poin ini diantaranya yaitu,

- a. Internalisasi dan edukasi tentang protokol kesehatan sesuai dengan kebiasaan hidup baru dengan budaya yang menerapkan Protokol Kesehatan Kepada seluruh masyarakat.
- b. Budaya penerapan Protokol Kesehatan masuk dalam aturan dan diterapkan atau diimplementasikan pada tata tertib di setiap bidang kegiatan terutama di tempat-tempat pendidikan, perkantoran dan tempat-tempat umum lainnya. jika masyarakat keluar dari rumah maka Prokes harus diterapkan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Adanya aturan atau payung hukum yang jelas dan penegakan hukum yang tegas dalam implementasinya di lapangan.
- d. Mendorong peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan sebagai suri tauladan di dalam kehidupan sehari-hari dengan mendoktrin atau mengedukasi protokol kesehatan kepada masyarakat.
- e. Memberlakukan hukum yang setimpal, sesuai bagi pelanggar protokol kesehatan selaras dengan batasan usia atau umur serta diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia.

14. **Optimalisasi Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan Pada Era Pandemi Covid-19.**

Pendidikan menjadi bidang aspek kedua yang perlu diperhatikan ketika masa Pandemi. Selain merupakan amanat dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan juga merupakan fondasi keberlangsungan suatu generasi. Demi melakukan minimalisir kontak langsung, pemerintah pada akhirnya harus membuat kebijakan pembelajaran jarak jauh untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 kluster sekolah. Pembelajaran jarak jauh ini seakan terdengar baru bagi beberapa murid sekolah. Namun demikian sebagai

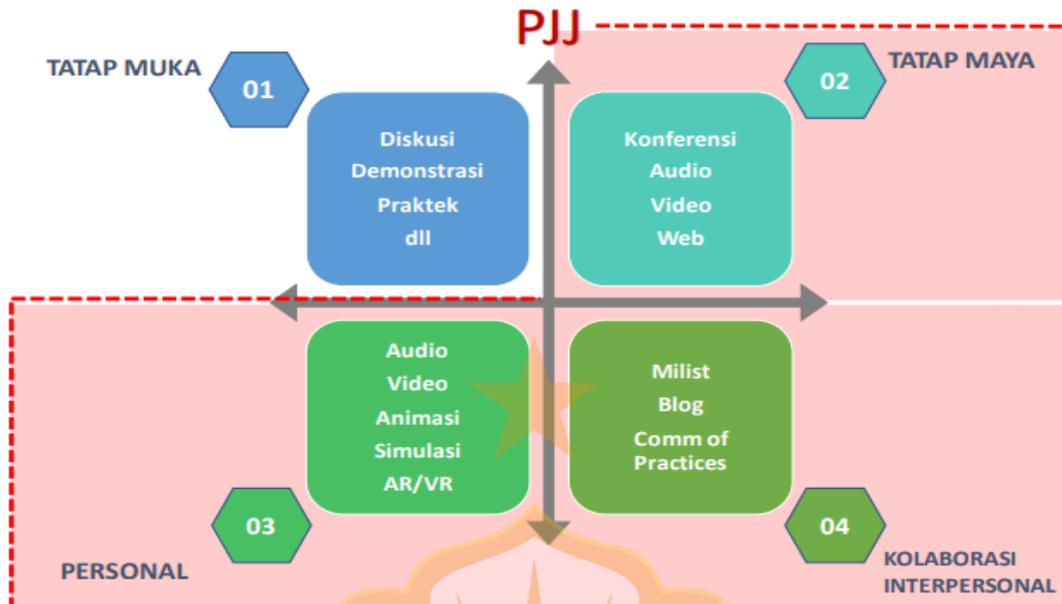
salah satu langkah Pemerintah dalam menjalankan amanat UUD NRI 1945 serta diperkuat dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah harus memiliki inisiatif dan inovasi dalam melaksanakan pendidikan terhadap anak bangsa, dimana hal ini telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Namun demikian, merujuk kepada kondisi lapangan pasca Covid-19 yang tidak menentu kemudian Pemerintah diharapkan memberikan kebijakan yang dapat memberikan kesetaraan belajar anak seluruh Indonesia, terutama kepada pelajar yang tinggal di daerah 3 T.

Terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam optimalisasi pendidikan pada masa pandemi Covid-19. Pada poin pertama adalah, pemerintah pusat dan daerah harus bekerjasama dalam melakukan penilaian terhadap daerah zonasi di tiap-tiap wilayah, terutama pada daerah pendidikan. Zonasi ini seperti yang telah terlaksana pada saat ini yaitu wilayah zona hijau untuk daerah aman, wilayah zona oranye yang merupakan daerah rawan, serta wilayah zona merah yang merupakan bahaya. Hal ini diharapkan mampu untuk melakukan kontrol terhadap aktivitas pendidikan di daerah mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Sinergitas ini perlu dilakukan agar tidak ada pihak yang nantinya akan dirugikan akibat kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan dari pemerintah sehingga berdampak kepada faktor lain seperti kesehatan.

Covid-19 membawa dampak yang luar biasa pada bidang pendidikan. Pemerintah diharuskan membuat solusi untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 pada sekolah. *Social distancing* wajib untuk diterapkan agar angka kasus baru pasien Covid-19 berlanjut terutama resiko kesehatan dan keamanan pada murid, keluarga, guru, hingga tenaga kependidikan. Hal ini tentu membuat proses pembelajaran sekolah yang awalnya menggunakan mekanisme tatap muka harus dilakukan dengan cara lain. Pada akhirnya saat ini Pemerintah memilih untuk menggunakan cara pendidikan jarak jauh sebagai solusi yang di mana murid berada di lokasi terpisah dari guru, serta praktik pembelajarannya menggunakan berbagai sarana dan media dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi atau media lain.

Gambar 3.1

POLA PEMBELAJARAN PADA BIDANG PENDIDIKAN



Sumber : Pusdatin Kemdikbud⁵³

Merujuk kepada gambar, pelajar sekolah sebenarnya dimungkinkan untuk memiliki berbagai macam cara untuk belajar dari rumah. Kreativitas antara sekolah, siswa dengan dukungan program pemerintah menjadi hal yang perlu untuk diintegrasikan. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh pelajar menggunakan pembelajaran jarak jauh diantaranya yaitu :

- Belajar interaktif bersama guru dengan cara daring;
- Mengerjakan soal-soal dari guru;
- Belajar dari buku teks pelajaran;
- Belajar dari sumber belajar daring (contohnya ruang guru dan zenius);
- Membuat proyek sederhana atau kegiatan praktek dari rumah;
- Belajar menggunakan sumber digitas seperti *google*;
- Belajar dari buku-buku non teks pelajaran;
- Belajar dari TV; dan
- Belajar dari radio.

⁵³ Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada <https://pusdatin.kemdikbud.go.id/category/pengumuman/> diakses pada Tanggal 14 Mei 2021.

Salah satu pendidikan jarak jauh yang digunakan dan digaungkan oleh Pemerintah Indonesia saat ini adalah penggunaan tatap maya atau juga dikenal dengan pembelajaran daring. Meskipun telah masuk kepada program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada pemerataan layanan pendidikan berkualitas yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.⁵⁴ Namun perlu diperhatikan kembali terkait keuntungan dan kelemahan pendidikan jarak jauh terutama sistem daring pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

Namun merujuk kepada suatu kebijakan, pasti tidak ada yang sempurna, termasuk kebijakan pembelajaran jarak jauh. Ada beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh diantaranya yaitu kesulitan guru dalam mengelola PJJ dan masih terfokus kepada penuntasan kurikulum. Selain itu, belum semua orang tua dapat mendampingi anak-anak belajar di rumah secara optimal karena harus bekerja maupun terbatasnya kemampuan sebagai pendamping belajar anak. Selanjutnya para peserta didik menjumpai kesulitan dalam berkonsentrasi belajar di rumah dan meningkatnya rasa jenuh yang berpotensi menimbulkan gangguan pada kesehatan jiwa.⁵⁵ Lebih lanjut berikut merupakan beberapa penghambat pelaksanaan pendidikan jarak jauh diantaranya yaitu;

- a. Keterbatasan penguasaan teknologi oleh siswa. Siswa sekolah dasar yang kehidupannya masih sebatas bermain, pengetahuannya pun mungkin masih terbatas pada apa yang diajarkan oleh guru, sehingga pemahaman akan teknologi digital pendukung pembelajaran oleh sebagian besar siswa sekolah dasar masih amat sangat rendah.
- b. Sarana prasarana yang belum memadai. Perlengkapan pendukung teknologi yang mahal harganya dan kondisi ekonomi yang sedang sulit, ditambah kondisi pandemi Covid-19, mengakibatkan siswa serba terbatas dalam menikmati sarana dan prasarana teknologi informasi yang sangat diperlukan dalam musibah Covid-19 ini.

⁵⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

⁵⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 7 Agustus 2020. "*Penyesuaian Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19*". Pada <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/penyesuaian-keputusan-bersama-empat-menteri-tentang-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid19> diakses pada tanggal 15 Mei 2021.

- c. Akses internet terbatas. Jaringan internet yang belum memadai dan tergelar secara merata hingga pelosok negeri mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pembelajaran daring.
- d. Kurang siapnya penyediaan anggaran. Faktor biaya juga ikut menghambat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, terutama bagi siswa dengan kesejahteraan yang rendah. Ketika siswa menggunakan kuota internet untuk memenuhi kebutuhan media daring, maka jelas mereka kesulitan untuk membayarnya. Ada permasalahan dalam pemanfaatan media daring, saat menteri pendidikan memberikan semangat produktivitas harus melaju, namun disisi lain kecakapan dan kemampuan finansial siswa belum melaju ke arah yang sama. Negara pun belum hadir secara menyeluruh dalam hal memfasilitasi kebutuhan biaya untuk menunjang pembelajaran daring.

Permasalahan ini merupakan kendala yang perlu dicarikan solusi bersama oleh pemerintah dalam rangka optimalisasi bidang pendidikan selama masa Pandemi Covid-19 pada saat ini. Upaya untuk menjaga generasi Indonesia dari kebodohan sehingga keberlanjutan bangsa Indonesia kedepan dapat tetap terjaga. (lihat tabel 3.3)

Mekanisme cara daring yang saat ini digunakan oleh pemerintah pada akhirnya membuat kesiapan seluruh komponen belajar jarak jauh juga harus tersedia. Hal-hal yang diperlukan diantaranya yaitu *handphone* hingga jaringan internet yang memadai. Namun kondisi masyarakat yang tidak semuanya berada pada kalangan ekonomi baik, membuat tidak seluruh anak memiliki fasilitas yang sama dalam belajar. Bahkan dalam beberapa kasus terdapat kasus pencurian yang diakibatkan upaya untuk membeli alat komunikasi yang sesuai dengan spesifikasi minimal untuk daring. Setidaknya bila ditelaah terdapat 4 tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring diantaranya yaitu:

- a. Ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah.
- b. Keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran.
- c. Keterbatasan sumberdaya untuk pemanfaatan teknologi Pendidikan seperti internet dan kuota.

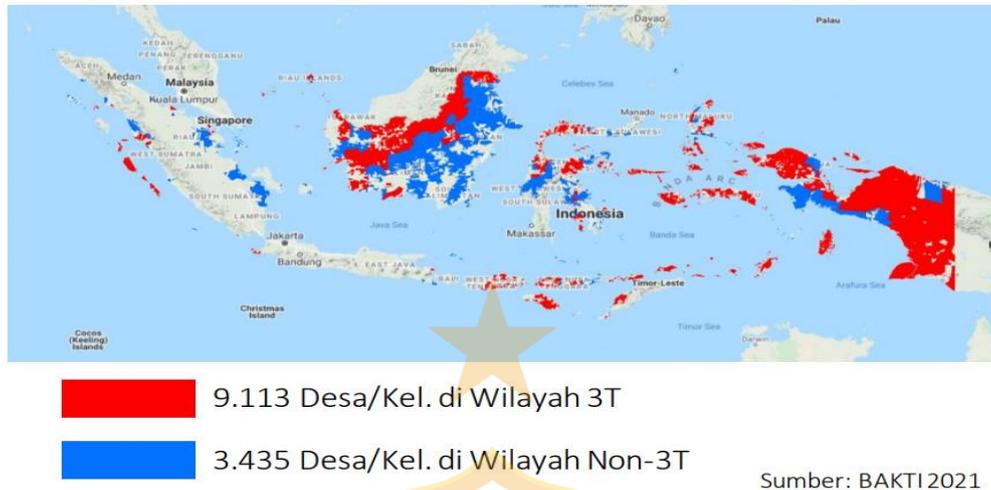
- d. Relasi guru-murid-orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral.

Merujuk kepada keberlanjutan pandemi Covid-19, tentu saja akan menimbulkan resiko dan dampak kedepannya pada dunia pendidikan secara nyata. Dampak tersebut terjadi dan perlu dilakukan peminimalisiran terhadap dampak kedepannya. Perlu adanya koordinasi nyata yang harus dilakukan oleh Kementerian terkait dengan pihak sekolah dan siswa terhadap sistem pembelajaran. Hal ini perlu dilakukan sehingga capaian oleh generasi anak muda di bidang pendidikan tidak terputus dan tertinggal dengan negara-negara lain terutama di kawasan akibat dari dampak Covid-19 di bidang pendidikan. (lihat tabel 3.4)

Selain kondisi diatas, juga terdapat kondisi dimana masih belum meratanya akses jaringan internet yang ada di Indonesia membuat tidak semua anak dapat mengakses jaringan pembelajaran yang baik, terutama di wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, NTT dan Sulawesi Tengah. Minimnya sinyal internet pada daerah-daerah tertentu, utamanya pada wilayah pedesaan membuat munculnya permasalahan baru yang muncul akibat adanya kebijakan pembelajaran melalui daring. Bahkan terdapat kasus-kasus tertentu di mana anak-anak di wilayah pedesaan Indonesia harus menyusuri perbukitan hingga pegunungan untuk mendapatkan akses internet dan tersambung pada jaringan daring aktivitas belajar-mengajar.



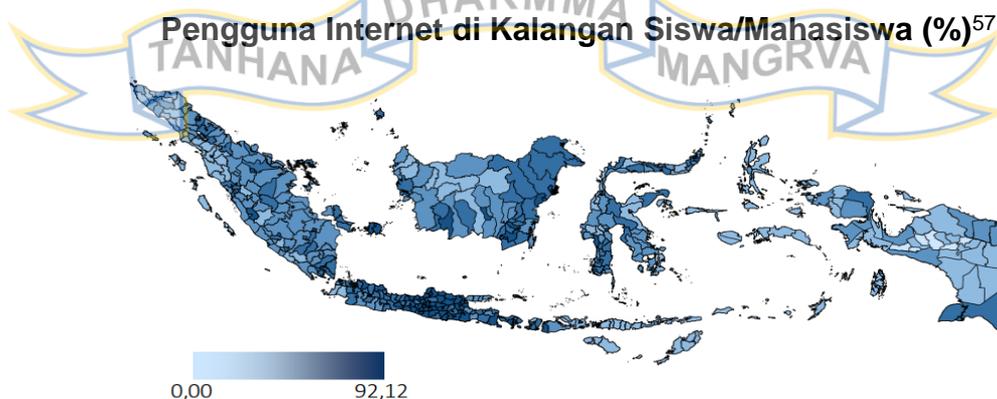
Gambar 3.2.
**SEBARAN DESA/KELURAHAN YANG BELUM TERJANGKAU
 LAYANAN SELULER 4G⁵⁶**



Sumber: Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi

Kesiapan sumber daya manusia mulai dari pendidik hingga siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar jarak jauh juga perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan perlu adanya inovasi dalam kegiatan belajar mengajar jarak jauh agar para siswa lebih interaktif dan mampu memahami setiap materi yang disampaikan oleh guru. Inovasi yang dibuat haruslah mampu membawa pelajar setidaknya dapat memahami materi layaknya belajar tatap muka secara langsung.

Gambar 3.3.
Pengguna Internet di Kalangan Siswa/Mahasiswa (%)⁵⁷



Sumber: Susenas 2020

⁵⁶ Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Pada <https://www.baktikominfo.id/> diakses pada Tanggal 16 Mei 2021.

⁵⁷ Badan Pusat Statistik. 2020. "Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Modul Ketahanan Sosial, 2020". Pada <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/view?kd=3249&th=2020> diakses pada tanggal 16 Mei 2021.

Masih minimnya sebaran luas jaringan internet di Indonesia, diharapkan mampu mengoptimalkan hal ini. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan hal tersebut yaitu dengan peningkatan kemampuan satelit hingga memperluas dan meningkatkan kemampuan panjang kabel laut jaringan internet. Palapa hingga yang terbaru Telkom 3S yang berhasil mengorbit sejak tanggal 15 Februari 2017 dapat menjadi solusi untuk pemerataan tersebut. Selain hal tersebut peningkatan kapasitas kecepatan internet melalui kabel bawah laut juga menjadi perhatian untuk pemerataan kecepatan internet pada wilayah 3T.

Pemaksimalan komponen potensi dalam negeri seperti KRI juga dapat menjadi solusi terbaik saat ini. Untuk pemerataan jaringan internet nasional 3 T. KRI dapat difungsikan untuk melaksanakan *relay* dalam mendukung PJJ di daerah wilayah 3 T seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku. Selain KRI milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan laut, Bintara pembina Desa (Babinsa) milik TNI Angkatan Darat hingga Bhabinkamtibmas yang dimiliki oleh Polri di desa, juga dapat dikerahkan untuk membantu melakukan pemerataan pendidikan di wilayah 3 T. Peranan potensi yang dimiliki oleh komponen nasional semuanya perlu untuk dikerahkan untuk menunjang pendidikan, terutama pada situasi pandemi saat ini.

15. Optimalisasi Pembangunan Nasional Bidang Ketahanan Pangan Pada Era Pandemi Covid-19.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan akibat munculnya pandemi Covid-19 yaitu ketahanan pangan nasional. Merujuk kepada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Indonesia harus mampu dalam menjaga ketersediaan pangan dalam negeri. Meskipun demikian, stok pangan nasional yang masih terpengaruh pandemi Covid-19 membuat kebijakan ketahanan pangan yang baik harus diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini karena ketika masa pandemi Covid-19 saat ini, berdampak kepada ketidakpastian pada perdagangan internasional. Masing-masing negara akan menunjukkan egonya, akibat pandemi Covid-19 terlebih ketika produksi pangan internasional juga mengalami penurunan.

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Indonesia sendiri, Indonesia sebenarnya telah memiliki konsepsi tentang perencanaan ketahanan pangan yang baik. Namun demikian,

merujuk kepada indeks produksi pangan memperlihatkan penurunan selama masa Pandemi pada tahun 2020. Hal ini diperkuat data dari *Global Food Security Index* (GFSI) yang dirilis lembaga *Economist Intelligence Unit* (EIU). Setiap tahunnya, Lembaga melakukan pengukuran indeks ketahanan pangan secara rutin terhadap 113 negara, termasuk Indonesia. Merujuk kepada data tersebut menyebutkan bahwa skor indeks ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2020 turun menjadi 59,5. Tahun sebelumnya yaitu 2019, indeks Indonesia lebih tinggi dan berada pada angka 60,9. Dengan skor tersebut, Indonesia di periode yang sama berada di peringkat 65 dunia pada aspek ketahanan pangan dan bila dibandingkan dengan tahun lalu, Indonesia turun 3 peringkat.⁵⁸

Pada data yang dimiliki oleh *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) dan *World Food Programme* (WFP) menyatakan bahwa setidaknya terdapat 27 negara terancam mengalami krisis pangan karena pandemi Covid-19 (lihat tabel 3.5). FAO dan WFP menjelaskan bahwa terdapat empat faktor utama bagaimana pandemi virus corona dapat mendisrupsi krisis pangan lebih dalam di dunia diantaranya yaitu,⁵⁹

- a. Lapangan kerja dan upah yang menurun;
- b. Disrupsi penanganan pandemi pada produksi dan pasokan pangan dunia;
- c. Menurunnya pendapatan pemerintah;
- d. Meningkatnya ketidakstabilan politik yang memicu konflik berbasis sengketa sumber daya alam.

Merujuk kepada cara yang digunakan, terutama yang telah tertulis pada Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 259/KPTS/RC. 020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, hingga saat ini Indonesia mengandalkan 2 cara dalam mempertahankan keseimbangan stok pangan yang dimilikinya. Cara tersebut yaitu melalui mekanisme impor dan peningkatan produksi dalam negeri. Bila merujuk kepada kapasitas Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui strategi nasional, berdasarkan

⁵⁸ Firmansyah, Luky Maulana dan Kevin Soegiono. 27 Februari 2021. "Akibat pandemi, indeks ketahanan pangan Indonesia kembali melorot". Pada <https://lokadata.id/artikel/akibat-pandemi-indeks-ketahanan-pangan-indonesia-kembali-melorot> diakses pada tanggal 17 Mei 2021.

⁵⁹ Lestari, Reni. 20 Juli 2020. "FAO: 27 Negara Dibayangi Krisis Pangan Gara-Gara Pandemi Covid-19". Pada <https://kabar24.bisnis.com/read/20200720/19/1268360/fao-27-negara-dibayangi-krisis-pangan-gara-gara-pandemi-covid-19> diakses pada tanggal 18 Mei 2021.

data milik Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2000 hingga 2019, Indonesia mengandalkan negara-negara seperti Amerika Serikat, China, India, Vietnam, Pakistan, Thailand, Taiwan, Myanmar, hingga Singapura. Dari negara-negara tersebut, impor beras Indonesia terbesar berasal dari negara Vietnam dan Thailand.⁶⁰

Selain melalui mekanisme impor, Indonesia saat ini juga telah mencoba mendorong petani nasional untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Cara-cara yang diberikan seperti pemberian bantuan berupa insentif pertanian hingga fasilitas pendukung lainnya. Bahkan Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan tugas khusus dari Presiden untuk membuat kawasan *food estate* di Kalimantan Tengah untuk menjaga stok ketahanan pangan nasional Indonesia. *Food estate* tersebut ditargetkan untuk 30 ribu hektare kebun singkong.⁶¹ Hal ini menjadi sebuah bukti dan langkah dari Pemerintah mengantisipasi adanya kemungkinan sulitnya mencari negara yang mau mengirimkan stok pangannya kepada Indonesia bila terjadi krisis pangan akibat pandemi Covid-19 terus berlanjut.

Peningkatan sektor pangan di Indonesia saat ini, selaras dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf amin Tahun 2019 – 2024. Poin pertama membahas terkait mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Pada poin ini didalamnya telah mencakup pembangunan infrastruktur kawasan persawahan dimana hal ini telah selaras dengan aspek yang perlu dikembangkan dikala pandemi.

Solusi yang dapat diambil dalam upaya peningkatan ketahanan pangan yaitu upaya untuk menemukan alternatif lain pengganti beras. Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong masyarakat bangga mengonsumsi pangan lokal dengan gerakan diversifikasi pangan. Program diversifikasi pangan tersebut bertujuan

⁶⁰ Kompas. 17 Maret 2021. "Indonesia Langgan Impor Beras dari Negara Mana Saja?". Pada <https://money.kompas.com/read/2021/03/17/141231426/indonesia-langganan-impor-beras-dari-negara-mana>

saja?page=all#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,dari%20negara%20Vietnam%20dan%20Thailand. diakses pada tanggal 18 Mei 2021.

⁶¹ Astungoro, Ronggo. 14 Maret 2021. "Kemenhan Targetkan Kembangkan 30 Ribu Hektare Kebun Singkong". Pada <https://www.republika.co.id/berita/qpy27d428/kemenhan-targetkan-kembangkan-30-ribu-hektare-kebun-singkong> diakses pada tanggal 19 Mei 2021.

mengganti beras sebagai kebutuhan bahan pokok dengan pangan lokal lain yang sehat dan bergizi. Dengan adanya program tersebut dari Pemerintah, Indonesia sebagai salah satu konsumen beras terbesar di dunia diharapkan mampu menemukan alternatif pangan lain sebagai pengganti. Hal ini difungsikan untuk memperbanyak pilihan ketika terjadi kondisi krisis pangan dunia terutama ketika masa pandemi Covid-19 yang membuat kondisi internasional menjadi tidak menentu. Selain itu, kondisi Indonesia yang secara matematis masih mengandalkan impor beras dari beberapa negara tetangga juga perlu dijadikan perhatian dikarenakan adanya kekhawatiran munculnya krisis pangan beras kedepannya.

Solusi lain yang dapat dilaksanakan untuk melaksanakan ketahanan pangan di masa pandemi saat ini adalah upaya dorongan dari pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam penyediaan, pengolahan dan pemasaran bahan pangan sebagai peningkatan ekonomi masyarakat. Diperlukan pelatihan dan pendampingan agar masyarakat yang berada di tataran bawah dapat memiliki kemampuan dan *skill* untuk melakukan hal tersebut.

Setidaknya terdapat beberapa alternatif makanan pokok yang dapat diambil oleh masyarakat sebagai langkahantisipasi bila terjadinya krisis pangan dunia yang melanda akibat dampak dari pandemi Covid-19. Makanan pokok tersebut merupakan sumber makanan selain nasi namun tetap mengandung banyak karbohidrat serta dapat tumbuh di Indonesia. Sumber makanan pengganti nasi tersebut diantaranya Jagung, Kentang, Sagu, Jelai, Sorgum, Jewawut, Ubi dan Singkong.

Merujuk kepada upaya ketahanan pangan nasional, Masyarakat memiliki peranan tersendiri agar ketersediaan pangan nasional selalu terpenuhi. Namun pada saat ini angka generasi muda yang berkarir di bidang pertanian sangatlah minim. Minat generasi muda untuk menjadi petani saat ini semakin berkurang. Petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun hanya berjumlah 2,7 juta orang. Hanya sekitar 8 persen dari total petani yang dimiliki oleh Indonesia. Sisanya lebih dari 90 persen masuk ke petani kolonial, atau petani yang sudah tua pada tahun

2020.⁶² Pemerintah Indonesia haruslah mulai memikirkan regenerasi petani yang nantinya akan menjadi tulang punggung pertanian, terutama di tengah krisis seperti masa pandemi saat ini.

Jumlah struktur penduduk bekerja sesuai lapangan pekerjaan pada bulan Agustus bekerja di sektor pertanian dengan pangsa pasar tenaga kerja sebesar 25,19% di tahun 2019 atau 31,87 juta orang dari total angkatan kerja 133,56 juta orang. Menurut penulis, data tersebut belum ideal, hal ini dikarenakan merujuk data yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian jumlah petani di Indonesia setiap tahunnya semakin mengalami penurunan. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan krisis pangan pada tahun-tahun kedepannya. (lihat tabel 3.6)

Fenomena ini semakin memprihatinkan untuk ketahanan pangan nasional ke depan ditambah lahan pertanian di Indonesia juga semakin sempit. Sementara jumlah petani semakin sedikit karena minat generasi muda dalam bertani masih minim dan berkurangnya lahan pertanian karena banyak lahan yang beralih fungsi menjadi area perkampungan dan industri. Sementara di sisi lain jumlah penduduk terus bertambah. Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang terancam kehilangan mimpinya mewujudkan kedaulatan pangan yang akan mendatang.⁶³

Selanjutnya solusi lain yang dapat dilaksanakan untuk menjaga ketahanan pangan pada masa pandemi saat ini adalah upaya dorongan dari pemerintah terhadap UMKM dalam penyediaan, pengolahan dan pemasaran bahan pangan sebagai peningkatan ekonomi masyarakat. Diperlukan pelatihan dan pendampingan agar masyarakat yang berada di tataran bawah dapat memiliki kemampuan dan *skill* untuk melakukan hal tersebut. Salah satu permasalahan di Indonesia adalah panjangnya rantai distribusi dari produsen pangan atau petani hingga sampai kepada konsumen. Petani di Indonesia tidak memiliki pengetahuan cara memasarkan hasil pertaniannya sehingga mereka hanya menjualnya kepada pengepul yang nantinya akan menjual kepada konsumen dan memiliki untung lebih banyak. Hal inilah mengapa petani di Indonesia memiliki penghasilan yang minim meskipun harga produk pertanian naik. Rantai pemasaran hasil pertanian yang

⁶² Antara. 13 April 2020. "Kementerian Pertanian: Petani Muda Hanya 2,7 Juta Atau 8 Persen". Pada <https://bisnis.tempo.co/read/1330943/kementerian-pertanian-petani-muda-hanya-27-juta-atau-8-persen/full&view=ok> diakses pada Tanggal 19 Mei 2021.

⁶³ Indah, Willys. 5 Februari 2020. "Minimnya Generasi Muda Menjadi Petani" Pada <https://www.kompasiana.com/willys81529/5e3ad5a2d541df3fd415fdf3/minimnya-generasi-muda-menjadi-petani> diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

panjang dan produsen (petani) sering dirugikan dapat disebabkan karena beberapa hal,⁶⁴

- a. Pasar yang tidak bekerja secara sempurna,
- b. Lemahnya informasi pasar,
- c. Lemahnya produsen (petani) memanfaatkan peluang pasar,
- d. Lemahnya posisi produsen (petani) untuk membuat penawaran untuk mendapatkan harga yang baik,
- e. Produsen (petani) melakukan usahatani tidak berdasarkan pada permintaan pasar, melainkan karena usahatani yang diusahakan secara turun temurun.



⁶⁴ Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Buleleng. 9 Oktober 2021. "Aspek Pemasaran Hasil Pertanian". Pada <https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/aspek-pemasaran-hasil-pertanian-19> diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

BAB IV PENUTUP

16. Kesimpulan

Penanganan pandemi Covid-19 yang sangat kompleks dan dampak pandemi Covid-19 yang sangat berbahaya mengakibatkan pembangunan nasional mengalami hambatan dan gangguan, sehingga berbagai sektor tidak dapat terlaksana dengan baik. Diperlukan payung hukum agar dapat menjamin terlaksananya optimalisasi kebijakan agar dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 dapat diatasi.

Setidaknya terdapat tiga sektor nasional yang memiliki dampak cukup signifikan akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, yaitu;

a. Sektor kesehatan. Kesehatan merupakan aspek terpenting yang mendapatkan dampak besar dari munculnya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Pemerintah bahkan melakukan beberapa kali *refocusing* anggaran hingga mengambil pinjaman luar negeri agar optimalisasi kebijakan pada aspek ini dapat berjalan secara lancar. Kementerian Kesehatan sebagai *leading sector* pada aspek ini pemerintah perlu keberanian mengambil terobosan jangka pendek, menengah hingga panjang. Terobosan yang diambil seperti; melaksanakan kerjasama dengan berbagai lembaga penelitian hingga pendidikan nasional maupun internasional. Dalam penelitian, diharapkan penemuan cipta produk seperti vaksin dapat dikembangkan secara mandiri sehingga Indonesia tidak memiliki ketergantungan dengan negara lain. Selain itu juga dapat dikembangkan pendidikan jurusan biomedis pada Universitas-universitas tertentu untuk menciptakan peneliti muda yang dapat memberikan dampak baik selepas pandemi Covid-19 berakhir.

b. Sektor Pendidikan. Optimalisasi dalam menghadapi tantangan dari pandemi Covid 19 adalah pendidikan. Sektor pendidikan perlu dilakukan optimalisasi pada kebijakan oleh Pemerintah Indonesia. Dikarenakan pada aspek ini sangat rentan adanya putusanya generasi emas Indonesia. Generasi tua yang akan digantikan generasi muda menjadi sebuah pertimbangan kuat sehingga membuat aspek pendidikan menjadi salah satu

hal penting pada taskap ini. Sulitnya tatap muka akibat penularan virus hingga kebijakan PJJ yang belum maksimal, menjadi kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Diperlukan adanya kerjasama dari seluruh lini lembaga sehingga pada aspek ini Kementerian Pendidikan sebagai *leading sector* kebijakan tidak berjalan sendirian.

c. Aspek terakhir yang perlu dilakukan optimalisasi yaitu sektor pertanian. Kementerian Pertanian sebagai kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada presiden dan *leading sector* penyiapan kebutuhan pangan perlu untuk membuat kebijakan strategis di bidang ketahanan pangan nasional. Melakukan kerjasama pada tataran pusat hingga daerah menjadi poin yang perlu diperhatikan. Dengan memanfaatkan komponen mulai dari masyarakat sipil, hingga aparat militer maupun Polri, diharapkan kebijakan ketahanan pangan yang digagas oleh Kementerian Pertanian dapat terlaksana dengan baik.

17. Rekomendasi

Guna mengefektifkan hasil pembangunan nasional terutama dihadapkan pada ancaman yang sedang dihadapi dan mungkin dihadapi oleh masyarakat Indonesia maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Pemerintah melalui Kemenko Polhukam dapat memberdayakan seluruh potensi komponen nasional seperti TNI/Polri untuk mendukung atau menyukseskan optimalisasi tiga bidang bahasan masalah yang terdampak pandemi virus covid 19, yaitu Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Ketahanan pangan.

b. Sebagai upaya perlindungan legal hukum terkait pelaksanaan optimalisasi aspek yang hendak dikembangkan, Pemerintah melalui Kemenkumham perlu membuat suatu aturan kebijakan/payung hukum yang tidak tumpang tindih dan bisa mewadahi kepentingan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat *omnibus law*.

c. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan diharapkan memiliki keberanian menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, mulai dari lembaga peneliti sebagai upaya cipta produk penanganan pandemi seperti

vaksin, maupun lembaga pendidikan tingkat universitas sebagai upaya untuk membuka jurusan pendidikan di bidang biomedis yang berfungsi untuk menciptakan anak muda berwawasan di bidang ini seperti pengembangan virus.

d. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan diharapkan mampu bekerjasama dengan berbagai pihak guna mewujudkan pemerataan bidang pendidikan di seluruh wilayah nusantara, terutama pada daerah 3 T.

e. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian diharapkan mampu membuat kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia sehingga kemampuan ketahanan pangan nasional dapat terjaga.

f. Pemerintah melalui Bapennas melakukan kajian secara lebih komprehensif terhadap kemungkinan ancaman yang akan dihadapi baik bersifat ancaman fisik maupun ancaman alam sehingga pembangunan nasional lebih berhasil guna bagi kehidupan masyarakat.

g. Pemerintah melalui Bapennas melakukan kajian secara lebih komprehensif terhadap perencanaan pembangunan nasional sehingga mampu dihadapkan pada dinamika kehidupan terutama perubahan yang menimbulkan berbagai permasalahan seperti pandemi Covid-19.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hermanto. 2015. Ketahanan Pangan Indonesia di Kawasan ASEAN. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 33 No. 1, Juli 2015: 19–31.
- Singiresu S Rao, John Wiley, & Sons. 2009. *Engineering Optimization: Theory and Practice*, Fourth Edition.
- Syafrida, Ralang Hartati, Bersama melawan Virus Covid 19 di Indonesia, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Tim Pokja Ketahanan Nasional, 2021, Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional, ISBN: 978-602-14873-6-5, Jakarta, Lemhannas RI.
- Yuliana. 2020. Corona Virus Disease (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur. Volume 2 nomor, February 2020. *Wellness and Healthy Magazine*.

Peraturan/Perundang-undangan:

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :
259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian
Pertanian Tahun 2020-2024.
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :
259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian
Pertanian Tahun 2020-2024.
- Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Diseas* 2019 (Covid-19).
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), 2020, "*Bahan
Ajar Bidang Studi Geostrategi dan Ketahanan Nasional*", Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2015.

Peraturan Menteri Pertanian No. 16/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2015.

Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015.

Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.01/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

Internet:

Aditya, Nicholas Ryan. 28 Januari 2021. "IDI: Hingga 27 Januari, 647 Tenaga Kesehatan Meninggal akibat Covid-19. Pada <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/09115011/idi-hingga-27-januari-647-tenaga-kesehatan-meninggal-akibat-covid-19> diakses pada tanggal 14 Mei 2021.

Agro Indonesia. 11 Februari 2020. "*Luas Baku Sawah Jadi 7,46 Juta Ha*". Pada <http://agroindonesia.co.id/2020/02/luas-baku-sawah-jadi-746-juta-ha/> diunduh pada tanggal 24 Maret 2021 pukul 15:11 WIB.

Antara. 13 April 2020. "Kementerian Pertanian: Petani Muda Hanya 2,7 Juta Atau 8 Persen". Pada <https://bisnis.tempo.co/read/1330943/kementerian-pertanian-petani-muda-hanya-27-juta-atau-8-persen/full&view=ok> diakses pada Tanggal 19 Mei 2021.

Arbar, Thea Fathanah. 6 Mei 2021. "Covid Menggila di Asia: Singapura, Malaysia hingga Nepal". Pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210506163531-4-243855/covid-menggila-di-asia-singapura-malaysia-hingga-nepal> diakses pada tanggal 13 Mei 2021.

Asian Development Bank. 3 April 2020. Pertumbuhan Asia Berkembang Akan Menurun Akibat Imbas COVID-19. Pada <https://www.adb.org/id/news/developing-asia-growth-fall-2020-covid-19-impact> diunduh pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 07:55 WIB.

Astungkoro, Ronggo. 14 Maret 2021. "Kemenhan Targetkan Kembangkan 30 Ribu Hektare Kebun Singkong". Pada <https://www.republika.co.id/berita/qpy27d428/kemenhan-targetkan-kembangkan-30-ribu-hektare-kebun-singkong> diakses pada tanggal 19 Mei 2021.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Pada <https://www.baktikominfo.id/> diakses pada Tanggal 16 Mei 2021.

Badan PPSDM Kesehatan Informasi SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/info/renbut diakses pada tanggal 13 April 2020.

Badan Pusat Statistik. 2020. "Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Modul Ketahanan Sosial, 2020". Pada <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/view?kd=3249&th=2020> diakses pada tanggal 16 Mei 2021.

BBC Indonesia. 10 Oktober 2020. Pandemi Covid-19 sebabkan kemiskinan ekstrem di seluruh dunia akan melonjak untuk pertama kalinya sejak tahun 1998. Pada <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54453523> diunduh pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 07:29 WIB.

Channel News Asia. 1 Juni 2021. "Makin parah, kasus harian COVID-19 Malaysia bisa tembus 13.000". Pada <https://internasional.kontan.co.id/news/makin-parah-kasus-harian-covid-19-malaysia-bisa-tembus-13000> diakses pada tanggal 13 Mei 2021.

CNBC Indonesia. 26 Maret 2021. "RI Masih Doyan Impor Alat Kesehatan Hingga Obat-obatan". Pada

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210325170435-8-232893/ri-masih-doyan-impor-alat-kesehatan-hingga-obat-obatan> diakses pada tanggal 13 Mei 2021.

CNN Indonesia. 2 Januari 2021. IDI: Kematian Nakes RI Tertinggi ke-5 di Dunia. Pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210102172140-20-588766/idi-kematian-nakes-ri-tertinggi-ke-5-di-dunia> diakses pada 14 Mei 2021.

CNN Indonesia. 12 Maret 2021. "5 Mutasi Covid-19 Dunia Hingga RI, Lebih Menular dan Pintar". Pada <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210312141414-199-616717/5-mutasi-covid-19-dunia-hingga-ri-lebih-menular-dan-pintar/2> diakses pada tanggal 12 Mei 2021.

Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Buleleng. 9 Oktober 2021. "Aspek Pemasaran Hasil Pertanian". Pada <https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/aspek-pemasaran-hasil-pertanian-19> diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

Fauzia, Mutia. 15 Agustus 2020. "BPS: Dampak Covid-19, Penduduk Miskin Naik Jadi 26,42 Juta Orang". Pada <https://money.kompas.com/read/2020/07/15/150436926/bps-dampak-covid-19-penduduk-miskin-naik-jadi-2642-juta-orang?page=all> diunduh pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 9:25 WIB.

Faqir, Anisyah Al. 12 November 2020. "Resesi Akibat Pandemi Covid-19 Hantam 92,9 Persen Negara di Dunia". Pada <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4406963/resesi-akibat-pandemi-covid-19-hantam-929-persen-negara-di-dunia> diakses pada tanggal 12 Mei 2021.

Firmansyah, Luky Maulana dan Kevin Soegiono. 27 Februari 2021. "Akibat pandemi, indeks ketahanan pangan Indonesia kembali melorot". Pada <https://lokadata.id/artikel/akibat-pandemi-indeks-ketahanan-pangan-indonesia-kembali-melorot> diakses pada tanggal 17 Mei 2021.

Gouvernement of India. IndiaFightsCorona COVID-19. Pada <https://github.com/CSSEGISandData/COVID19> diakses pada tanggal 12 Mei 2021.

- Google. 25 Maret 2021. "Kasus Baru dan Kematian".
<https://www.google.co.id/search?q=korban+covid-19+dunia> diunduh pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 06:57 WIB.
- Hartomo, Giri. 2 April 2019. "Hanya 14,15% dari Total PNS, Indonesia Darurat Tenaga Kesehatan?". Pada <https://economy.okezone.com/read/2019/04/02/320/2038110/hanya-14-15-dari-total-pns-indonesia-darurat-tenaga-kesehatan> diakses pada tanggal 13 April 2021.
- Hidayatullah, Taufiq. 21 Agustus 2020. "*Pandemi korona ancam ketahanan pangan Indonesia*". Pada <https://lokadata.id/artikel/pandemi-korona-ancam-ketahanan-pangan-indonesia> diunduh pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 10:01 WIB.
- Indah, Willys. 5 Februari 2020. "Minimnya Generasi Muda Menjadi Petani" Pada <https://www.kompasiana.com/willys81529/5e3ad5a2d541df3fd415fdf3/minimnya-generasi-muda-menjadi-petani> diakses pada tanggal 20 Mei 2021.
- Isa. 10 Juni 2021. "Covid-19 Melonjak, BOR di Malaysia Tembus 100 Persen". <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210610155556-106-652758/covid-19-melonjak-bor-di-malaysia-tembus-100-persen> diakses pada tanggal 13 Mei 2021.
- Jayani, Dwi Hadya. 30 Maret 2020. "Ini Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit 34 Provinsi di Indonesia". Pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/30/ini-rasio-tempat-tidur-rumah-sakit-34-provinsi-di-indonesia#> diakses pada Tanggal 13 Mei 2021.
- Julian, Muhammad. 16 November 2020. "*Di tengah pandemi Covid-19, ketahanan pangan Indonesia disorot*". Pada <https://industri.kontan.co.id/news/di-tengah-pandemi-covid-19-ketahanan-pangan-indonesia-disorot> diunduh pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 9:40 WIB.
- Kamil, Irfan. 7 Februari 2021. "*UPDATE: Tambah 10.827, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.157.837 Orang*". Pada <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/07/16153181/update-tambah-10827-kasus-covid-19-indonesia-kini-1157837-orang?page=all> diunduh pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 08:02 WIB.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. "Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 : Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi". Pada Kemenkeu [https://fiskal.kemenkeu.go.id › kem_ppkf_2021](https://fiskal.kemenkeu.go.id/kem_ppkf_2021) diakses pada tanggal 12 Mei 2021.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 7 Agustus 2020. "Penyesuaian Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19". Pada <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/penyesuaian-keputusan-bersama-empat-menteri-tentang-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid19> diakses pada tanggal 15 Mei 2021.

Kompas. 17 Maret 2021. "Indonesia Langgan Impor Beras dari Negara Mana Saja?". Pada <https://money.kompas.com/read/2021/03/17/141231426/indonesia-langgan-impor-beras-dari-negara-mana-saja?page=all#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,dari%20negara%20Vietnam%20dan%20Thailand.> diakses pada tanggal 18 Mei 2021.

Laraspati, Angga. 6 November 2020. "*Hasil Survei Tunjukkan Kesadaran Masyarakat soal Pencegahan COVID-19*". Pada <https://news.detik.com/berita/d-5243808/hasil-survei-tunjukkan-kesadaran-masyarakat-soal-pencegahan-covid-19> diakses pada 8 Februari 2021.

Lestari, Reni. 20 Juli 2020. "FAO: 27 Negara Dibayangi Krisis Pangan Gara-Gara Pandemi Covid-19". Pada <https://kabar24.bisnis.com/read/20200720/19/1268360/fao-27-negara-dibayangi-krisis-pangan-gara-gara-pandemi-covid-19> diakses pada tanggal 18 Mei 2021.

Mardiyah, Fatimah. 7 September 2020. "*Apakah yang Dimaksud Protokol Kesehatan COVID-19?*". Pada <https://tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3W3> diunduh pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 23:17 WIB.

Mazumdar, Tulip. 18 April 2020. "*Apa itu WHO dan apa yang mereka lakukan?*". <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52314496> diunduh pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 06:57 WIB.

Meydhalifah, Tita. 7 Desember 2020. Update Kasus Covid-19 Asia Tenggara: Indonesia Nomor 1, Selisih 140.000 Kasus dari Filipina. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/07/115000065/update-kasus-covid-19-asia-tenggara--indonesia-nomor-1-selisih-140.000?page=all> diunduh pada tanggal 25 Maret 2020 pukul 08:24 WIB.

Nuraini, Tantiya Nimas. 2 April 2020. "*Kronologi Munculnya Covid-19 di Indonesia hingga Terbit Keppres Darurat Kesehatan*". Pada <https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-klh.html?page=7> diunduh pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 07:41 WIB.

Nuraini, Tantiya Nimas. 15 April 2020. "*Inilah Dampak Panjang dari Virus Corona bagi Kesehatan Tubuh*". Pada <https://www.merdeka.com/trending/inilah-dampak-panjang-dari-virus-corona-bagi-kesehatan-tubuh-klh.html?page=3> diunduh pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 8:31 WIB.

Oke News. 14 Mei 2021. "Singapura dan Thailand Catat Kenaikan Harian Tertinggi Kasus Covid-19". Pada <https://news.okezone.com/read/2021/05/14/18/2410220/singapura-dan-thailand-catat-kenaikan-harian-tertinggi-kasus-covid-19> diakses pada tanggal 13 Mei 2021.

Pramudiarja, AN Uyung. 22 Februari 2021. "Vaksin Nusantara Vs Vaksin Merah Putih, Bedanya Apa Sih?". Pada <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5399932/vaksin-nusantara-vs-vaksin-merah-putih-bedanya-apa-sih> diakses pada tanggal 14 Mei 2021.

Pranita, Ellyvon. 4 Januari 2021. "*Kematian Tenaga Medis Indonesia Akibat Covid-19 Tertinggi di Asia, Kenapa?*". Pada <https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/04/193000323/kematian-tenaga-medis-indonesia-akibat-covid-19-tertinggi-di-asia-kenapa-?page=all> diunduh pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 14:05 WIB.

Purwanto, Antonius. 7 Agustus 2020. Strategi ASEAN merespon dampak Covid-19. Pada <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/strategi-asean-merespons-dampak-covid-19> diunduh pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 08:36 WIB.

Purwanto, Antonius. 27 Januari 2021. Ekonomi Indonesia pada masa Pandemi Covid-19: Potret dan strategi pemulihan 2020-2021. Pada <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020-2021> diunduh pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 07:35 WIB.

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada <https://pusdatin.kemdikbud.go.id/category/pengumuman/> diakses pada Tanggal 14 Mei 2021.

Putra, Tri. 21 Agustus 2020. Dihantam Corona, Ekonomi Negara Mana di ASEAN Paling Tangguh?. Pada <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200821141920-17-181140/dihantam-corona-ekonomi-negara-mana-di-asean-paling-tangguh> diunduh pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 08:43 WIB

Rantung, Ferdi. 30 April 2020. *"Imbas Corona, Rencana Pembangunan Nasional 2020 - 2024 Terganggu"*. Pada <https://ekbis.sindonews.com/read/12711/33/imbis-corona-rencana-pembangunan-nasional-2020-2024-terganggu-1588230246> diunduh pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 08:02 WIB.

Rizal, Jawahir Gustav. 29 Mei 2021. *"Vietnam Temukan Mutasi Gabungan Virus Corona Varian Inggris dan India, Seberapa Bahaya?"*. Pada <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/29/150000265/vietnam-temukan-mutasi-gabungan-virus-corona-varian-inggris-dan-india?page=all> diakses pada tanggal 11 Mei 2021

Sandi, Ferry. 16 April 2020. *"3 Bahan Pokok Ini RI Belum Merdeka dari Impor"*. Pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200416125906-4-152379/3-bahan-pokok-ini-ri-belum-merdeka-dari-impor> diunduh pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 9:56 WIB.

Santia, Tira. 5 Mei 2020. Daftar Merek Besar yang Terkapar Akibat Corona. Pada <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4245595/daftar-merek-besar-yang-terkapar-akibat-corona> diunduh pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 06:57 WIB

Sembiring, Lidya Julita. 5 Mei 2021. *"Masih Resesi! Pertumbuhan Ekonomi RI Q1-2021 Negatif 0,74%"*. Pada

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210505090813-4-243257/masih-resesi-pertumbuhan-ekonomi-ri-q1-2021-negatif-074> diakses pada tanggal 12 Mei 2021.

Setiawan, samhis. 5 Juni 2021. *"Pengertian Ketahanan Nasional – Ciri, Sifat, Asas, Unsur, Fungsi, Konsepsi"*. Pada <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-ketahanan-nasional/> diunduh pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 23:10 WIB.

Sumartiningtyas, Holy Kartika Nurwigawati. *"ICU Jakarta Menipis, Ahli Ingatkan Rumah Sakit di Indonesia Perlu Waspada"*. Pada <https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/10/130200923/icu-jakarta-menipis-ahli-ingatkan-rumah-sakit-di-indonesia-perlu-waspada?page=all> diunduh pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 14:30 WIB.

Yassaroh, Sitta Sakinatu. 6 November 2020. *"Dampak Resesi Ekonomi, Indonesia Alami Beberapa Kerugian"*. Pada <http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2020/11/06/dampak-resesi-ekonomi-indonesia-alami-beberapa-kerugian-2/#:~:text=Dirinya%20mengatakan%2C%20dampak%20dari%20resesi,peningkatan%20harga%20komoditas%20secara%20tajam> diakses pada tanggal 12 Mei 2021.



ALUR PIKIR

OPTIMALISASI PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM ERA PANDEMI COVID-19 GUNA KETAHANAN NASIONAL



Tabel 3.1.

Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit 34 Provinsi di Indonesia

| Nama Daerah | Value |
|---------------------------|-------|
| DKI Jakarta | 2,33 |
| Sulawesi Utara | 2,1 |
| Kalimantan Timur | 1,84 |
| DI Yogyakarta | 1,82 |
| Aceh | 1,6 |
| Gorontalo | 1,57 |
| Sumatera Utara | 1,54 |
| Bali | 1,54 |
| Sulawesi Selatan | 1,53 |
| Kepulauan Riau | 1,44 |
| Kalimantan Utara | 1,41 |
| Maluku | 1,39 |
| Papua Barat | 1,38 |
| Sulawesi Tengah | 1,37 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 1,32 |
| Sumatera Barat | 1,31 |
| Papua | 1,24 |

| | |
|--------------------|------|
| Bengkulu | 1,19 |
| Jawa Tengah | 1,15 |
| Jambi | 1,14 |
| Kalimantan Selatan | 1,14 |
| Maluku Utara | 1,1 |
| Sumatera Selatan | 1,08 |
| Sulawesi Tenggara | 1,08 |
| Jawa Timur | 1,07 |
| Kalimantan Barat | 1,03 |
| Riau | 0,98 |
| Lampung | 0,91 |
| Kalimantan Tengah | 0,91 |
| Sulawesi Barat | 0,91 |
| Banten | 0,87 |
| Jawa Barat | 0,85 |
| NTT | 0,81 |
| NTB | 0,71 |

Sumber : Kata data, 2020⁶⁵

⁶⁵ Jayani, Dwi Hadya. 30 Maret 2020. "Ini Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit 34 Provinsi di Indonesia". Pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/30/ini-rasio-tempat-tidur-rumah-sakit-34-provinsi-di-indonesia#> diakses pada Tanggal 13 Mei 2021.

Tabel 3.2.

Rasio Tenaga Kesehatan Indonesia di Setiap Daerah

| No. | Nama Provinsi | Dokter Umum | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Farmasi | Kesmas | Kesling | Gizi | Ahli Teknologi Laboratorium Medik |
|-----|---------------------------|-------------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------------------------|
| 1 | ACEH | 1 : 30 | 1 : 6 | 1 : 220 | 1 : 232 | 1 : 26 | 1 : 39 | 1 : 16 | 1 : 11 | 1 : 17 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 1 : 23 | 1 : 6 | 1 : 113 | 1 : 117 | 1 : 12 | 1 : 12 | 1 : 4 | 1 : 6 | 1 : 6 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 1 : 20 | 1 : 8 | 1 : 148 | 1 : 111 | 1 : 28 | 1 : 9 | 1 : 7 | 1 : 12 | 1 : 17 |
| 4 | RIAU | 1 : 24 | 1 : 7 | 1 : 122 | 1 : 107 | 1 : 23 | 1 : 10 | 1 : 4 | 1 : 7 | 1 : 11 |
| 5 | JAMBI | 1 : 28 | 1 : 7 | 1 : 185 | 1 : 147 | 1 : 30 | 1 : 13 | 1 : 10 | 1 : 10 | 1 : 19 |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 1 : 15 | 1 : 3 | 1 : 154 | 1 : 141 | 1 : 19 | 1 : 18 | 1 : 8 | 1 : 8 | 1 : 11 |
| 7 | BENGKULU | 1 : 23 | 1 : 6 | 1 : 221 | 1 : 198 | 1 : 29 | 1 : 43 | 1 : 10 | 1 : 19 | 1 : 19 |
| 8 | LAMPUNG | 1 : 21 | 1 : 4 | 1 : 147 | 1 : 144 | 1 : 13 | 1 : 12 | 1 : 8 | 1 : 7 | 1 : 11 |
| 9 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1 : 269 | 1 : 51 | 1 : 1813 | 1 : 756 | 1 : 299 | 1 : 124 | 1 : 67 | 1 : 89 | 1 : 155 |
| 10 | KEPULAUAN RIAU | 1 : 26 | 1 : 6 | 1 : 178 | 1 : 84 | 1 : 23 | 1 : 8 | 1 : 7 | 1 : 8 | 1 : 12 |
| 11 | DKI JAKARTA | 1 : 65 | 1 : 19 | 1 : 285 | 1 : 66 | 1 : 102 | 1 : 7 | 1 : 5 | 1 : 12 | 1 : 26 |
| 12 | JAWA BARAT | 1 : 11 | 1 : 3 | 1 : 77 | 1 : 43 | 1 : 12 | 1 : 4 | 1 : 3 | 1 : 4 | 1 : 6 |
| 13 | JAWA TENGAH | 1 : 17 | 1 : 4 | 1 : 133 | 1 : 68 | 1 : 25 | 1 : 5 | 1 : 4 | 1 : 7 | 1 : 12 |
| 14 | DI YOGYAKARTA | 1 : 54 | 1 : 19 | 1 : 250 | 1 : 66 | 1 : 63 | 1 : 6 | 1 : 8 | 1 : 16 | 1 : 28 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15 | JAWA TIMUR | 1 : 22 | 1 : 6 | 1 : 132 | 1 : 64 | 1 : 24 | 1 : 5 | 1 : 3 | 1 : 8 | 1 : 10 |
| 16 | BANTEN | 1 : 11 | 1 : 4 | 1 : 76 | 1 : 42 | 1 : 12 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 6 |
| 17 | BALI | 1 : 36 | 1 : 10 | 1 : 215 | 1 : 117 | 1 : 27 | 1 : 9 | 1 : 10 | 1 : 12 | 1 : 17 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 1 : 27 | 1 : 5 | 1 : 213 | 1 : 102 | 1 : 26 | 1 : 10 | 1 : 12 | 1 : 16 | 1 : 21 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 1 : 14 | 1 : 3 | 1 : 149 | 1 : 110 | 1 : 17 | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 13 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 1 : 17 | 1 : 3 | 1 : 174 | 1 : 88 | 1 : 21 | 1 : 9 | 1 : 9 | 1 : 12 | 1 : 13 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 1 : 19 | 1 : 4 | 1 : 221 | 1 : 130 | 1 : 22 | 1 : 14 | 1 : 8 | 1 : 16 | 1 : 17 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 1 : 21 | 1 : 6 | 1 : 169 | 1 : 112 | 1 : 26 | 1 : 12 | 1 : 11 | 1 : 19 | 1 : 17 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 1 : 30 | 1 : 8 | 1 : 225 | 1 : 98 | 1 : 32 | 1 : 11 | 1 : 8 | 1 : 10 | 1 : 20 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 1 : 35 | 1 : 7 | 1 : 249 | 1 : 141 | 1 : 34 | 1 : 26 | 1 : 10 | 1 : 11 | 1 : 16 |
| 25 | SULAWESI UTARA | 1 : 37 | 1 : 4 | 1 : 250 | 1 : 69 | 1 : 24 | 1 : 14 | 1 : 18 | 1 : 16 | 1 : 6 |
| 26 | SULAWESI TENGAH | 1 : 18 | 1 : 4 | 1 : 238 | 1 : 163 | 1 : 30 | 1 : 45 | 1 : 17 | 1 : 10 | 1 : 10 |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 1 : 19 | 1 : 9 | 1 : 189 | 1 : 112 | 1 : 26 | 1 : 24 | 1 : 11 | 1 : 13 | 1 : 14 |
| 28 | SULAWESI TENGGARA | 1 : 17 | 1 : 6 | 1 : 205 | 1 : 156 | 1 : 28 | 1 : 45 | 1 : 18 | 1 : 26 | 1 : 14 |
| 29 | GORONTALO | 1 : 27 | 1 : 5 | 1 : 190 | 1 : 124 | 1 : 25 | 1 : 47 | 1 : 19 | 1 : 36 | 1 : 9 |
| 30 | SULAWESI BARAT | 1 : 12 | 1 : 4 | 1 : 133 | 1 : 116 | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 8 | 1 : 10 | 1 : 7 |
| 31 | MALUKU | 1 : 14 | 1 : 2 | 1 : 236 | 1 : 90 | 1 : 16 | 1 : 22 | 1 : 20 | 1 : 24 | 1 : 8 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 32 | MALUKU UTARA | 1 : 20 | 1 : 3 | 1 : 170 | 1 : 140 | 1 : 23 | 1 : 42 | 1 : 9 | 1 : 22 | 1 : 11 |
| 33 | PAPUA BARAT | 1 : 26 | 1 : 4 | 1 : 297 | 1 : 109 | 1 : 23 | 1 : 21 | 1 : 13 | 1 : 17 | 1 : 19 |
| 34 | PAPUA | 1 : 23 | 1 : 3 | 1 : 217 | 1 : 83 | 1 : 18 | 1 : 19 | 1 : 12 | 1 : 18 | 1 : 19 |

Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia⁶⁶



⁶⁶ Badan PPSDM Kesehatan Infomasi SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/info/renbut diakses pada tanggal 13 April 2020.

Tabel 3.3.

Keuntungan dan Kerugian Sistem Daring Dalam Pembelajaran

| Keuntungan | Kerugian |
|----------------------------------|--|
| Meminimalisir kontak langsung | Membutuhkan kedisiplinan => tujuan akhir pasca pembelajaran; |
| Waktu fleksibel | Plagiarism dan mencontek => pertanyaan acak, waktu ketat, soal berorientasi "problem." |
| Berbasis kebutuhan dan kemampuan | Isolasi => kombinasi <i>blended learning</i> . |
| Modern | Potensi masalah Sumber Daya Manusia dan operasional |
| | Interaksi antara guru dan siswa akan terganggu |

Sumber : Diolah oleh Penulis



Tabel 3.4.

Resiko Bidang Pendidikan akibat Covid-19 yang berlangsung Lama

| MURID | GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | SISTEM PERSEKOLAHAN |
|--|---|--|
| Intervensi gizi dan makanan tambahan, juga alat belajar non digital bagi kelompok rentan | Beban berlebihan karena perubahan cara kerja yang signifikan | Seleksi penerimaan murid baru di berbagai jenjang, termasuk perguruan tinggi |
| Kesenjangan capaian pembelajaran dan hilangnya kesempatan berprestasi (bagi semua kelompok murid dengan kemampuan tinggi maupun rendah) | Motivasi yang rendah karena pengaruh kondisi sosial emosional | Kekurangan pendapatan yang diperlukan untuk operasional |
| Tidak ada akses pada kegiatan pendukung yang esensial bagi pembelajaran (termasuk pelajaran agama, olahraga dan BK, karyawisata, ekstra kurikuler dll) | Tidak ada akses pada pelatihan dan pengembangan profesi yang esensial untuk peningkatan kompetensi | Biaya tambahan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh |
| Perlindungan kesehatan dan keselamatan tambahan untuk mengurangi resiko infeksi berkelanjutan | Gagal melibatkan orangtua dalam proses belajar mengajar | Transisi dan orientasi murid di jenjang baru |
| Konseling dan isu kesehatan mental (pada individu maupun dalam keluarga) | Tidak memiliki kapasitas untuk menghasilkan sumber ajar/materi konten untuk pembelajaran jarak jauh | Pemberhentian berbagai kegiatan dalam jangka panjang yang berdampak pada kualitas layanan |
| Remedial program (terutama untuk kelompok khusus) | Minimnya proses review kinerja yang dibutuhkan | Keputusan kepegawaian pada staff yang perlu direktut di tahun ajaran baru, maupun staff yang tidak produktif dalam masa Covid |
| Resiko putus sekolah | Resiko berhenti bekerja karena perubahan kondisi keluarga dan kapasitas pribadi | Gagal melibatkan sumber daya di luar sekolah (relawan profesional, dunia usaha dan industri) untuk turut mengambil tanggung jawab dalam pendidikan |

Sumber : Dinas Pendidikan DKI Jakarta



Tabel 3.5.

Tabel Negara yang terdampak krisis pangan akibat Pandemi Covid 19

| No | Benua | Negara |
|---------|----------------|--------------|
| 1. | Asia | Afghanistan |
| | | Bangladesh |
| 2. | Amerika Tengah | Haiti |
| | | Venezuela |
| | | Kolombia |
| | | Ekuador |
| | | Peru |
| | | Guatemala |
| | | Honduras |
| | | El Salvador |
| | | Nicaragua |
| | | 3. |
| Lebanon | | |
| Sudan | | |
| Yaman | | |
| Suriah | | |
| | | |
| 4. | Afrika | Burkina Faso |
| | | Kamerun |
| | | Liberia |
| | | Mali |
| | | Niger |
| | | Nigeria |

| | | |
|--|--|------------------------|
| | | Mozambik |
| | | Sierra Leone |
| | | Zimbabwe |
| | | Kongo |
| | | Republik Afrika Tengah |

Sumber : *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)* dan *World Food Programme (WFP)*

Tabel 3.6.

Jumlah Petani Indonesia Setiap Tahunnya

| No | Tahun | Tenaga kerja Pertanian Sempit | Kontribusi Terhadap Tenaga Kerja Nasional; |
|----|-------|-------------------------------|--|
| 1. | 2015 | 35,27 Juta | 30,72% |
| 2. | 2016 | 35,27 Juta | 29,78% |
| 3. | 2017 | 33,36 Juta | 27,56% |
| 4. | 2018 | 33,11 Juta | 26,70% |
| 5. | 2019 | 31,87 Juta | 25,19% |

Sumber : Kementerian Pertanian Republik Indonesia⁶⁷

⁶⁷ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 259/Kpts/Rc.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 – 2024.

RIWAYAT HIDUP



Gandawilaga, S.E.,M.M. dilahirkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1971. Saat ini penulis menjabat sebagai Sekdisopslatal Mabesal. Penulis dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri dari seorang istri yang bernama Yaslina, S.K.M., M.K.M., M.A.R.S. Penulis merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Bumimoro Surabaya pada tahun 1993, lulus Suspaja tahun 1994. Lulus Diklapa I/Kom angkatan-12 tahun 1998, kemudian lulus Diklapa II/Koum angkatan-3 tahun 2004, selanjutnya penulis

lulus Dikreg Seskoal angkatan-45 tahun 2007, penulis juga lulus Pendidikan Strata Satu bidang Ekonomi tahun 2010 dan lulus Pendidikan Strata Dua bidang Magister Manajemen tahun 2013, kemudian penulis lulus Dikreg Sesko TNI angkatan-45 tahun 2018 dan pada tahun 2021 mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Lemhannas RI.

Pengalaman Penugasan. Penulis setelah lulus dari Suspaja tahun 1994, bertugas di KRI Slamet Riyadi-352 Koarmatim sebagai ass Padiv Sen tahun 1994, kemudian bertugas di KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355 sebagai Padiv Bahari tahun 1995. Pada pertengahan tahun 1996 penulis bertugas di KRI Sigurot-864 Koarmabar sebagai Kadephops. Selanjutnya penulis bertugas di KRI Teluk Peleng-535 sebagai Kadepops pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2001, penulis naik jabatan sebagai Palaksa di KRI TPL-535. Kemudian penulis bertugas sebagai Komandan KRI Sigalu-857 pada tahun 2002 sampai awal tahun 2004 kemudian melanjutkan pendidikan Diklapa II. Selesai Diklapa II, selanjutnya penulis bertugas di Satfib Koarmabar sebagai Kasiopslat pada tahun 2004. Lalu penulis bertugas kembali ke KRI Sultan Taha Syaifuddin-376 sebagai Palaksa pada tahun 2005, Setelah itu penulis bertugas sebagai Komandan KRI

Silas Papare-386 pada tahun 2006. Pada awal tahun 2007 penulis mengikuti Dikreg Seskoal angkatan 45. Setelah lulus Dikreg Seskoal, penulis bertugas sebagai Pabanopslat Sops Lantamal II Padang pada akhir tahun 2007. Pada tahun 2008 penulis bertugas sebagai Komandan Satkamla Lantamal III Jakarta. Selanjutnya Pada tahun 2010 penulis bertugas sebagai Pabandya Renpras Srena Kasal sampai akhir tahun 2010 dan selanjutnya penulis bertugas menjadi Pasops Satkor Koarmabar. Selanjutnya penulis dipercaya bertugas kembali sebagai Komandan Lanal Bengkulu pada tahun 2011 sampai awal tahun 2012. Setelah itu, penulis bertugas sebagai Paban Progar Srena Koarmabar pada tahun 2012. Pada tahun 2014 penulis kembali ke Padang bertugas sebagai Asrena Komandan Lantamal II Padang. Kemudian penulis bertugas sebagai Staf ahli "A" bidang Wilnas Panglima Koarmabar pada tahun 2015. Pada tahun 2016 penulis bertugas sebagai Kasubdis Proglab Dispotmar Mabasal, sampai penulis mengikuti Dikreg Sesko TNI tahun 2018. Selesai Dikreg Sesko TNI, penulis bertugas sebagai Asrena Pangkoarmada I pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis bertugas sebagai Sekdisopslat Mabasal hingga sekarang.

